

**PERSEPSI PENYUSUN DAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 45 (PSAK 45)
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
(Survey pada Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali)**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI
DEPARTEMEN AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
MADE ARISTIA PRAYUDI
No. Pokok : 040710096**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2011**

SKRIPSI

**PERSEPSI PENYUSUN DAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
TERHADAP PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NOMOR 45 (PSAK 45)
TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
(Survey pada Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali)**

**DIAJUKAN OLEH
MADE ARISTIA PRAYUDI
No. Pokok : 040710096**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH
DOSEN PEMBIMBING,**



Dr. I MADE NARSA,SE,M.Si., Ak.

TANGGAL...19/8/2011

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. AGUS WIDODO.M.,Msi,Ak.

TANGGAL...24/8-2011

Surabaya, *28 Juli 2011*

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Dr. I MADE NARSA, SE, M.Si., Ak.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Made Aristia Prayudi, 040710096), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Juli 2011



Made Aristia Prayudi
NIM: 040710096

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur penulis haturkan atas *Asung Kertha Wara Nugraha* Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi yang berjudul “PERSEPSI PENYUSUN DAN PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 45 (PSAK 45) TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Survey pada Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil, sebagai sebuah motivasi yang tidak ternilai sejak awal tahap penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE., MSc., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Drs. Agus Widodo Mardijuwono, MSi., Ak. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

3. Dr. I Made Narsa, SE, M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas dalam membantu proses penyusunan skripsi serta telah banyak memberikan waktu, ilmu, semangat, nasehat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis selama masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
7. Kepala Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali atas ijin yang diberikan kepada penulis serangkaian pengambilan data penelitian.
8. Bapak Drs. I Wayan Sukadana dan Ibu Dra. Luh Tariani, selaku orang tua penulis yang tidak pernah lelah memberikan doa, motivasi, dan dukungan moril yang selalu dapat membangkitkan semangat penulis untuk tidak pernah menyerah agar bisa memberikan hasil terbaik bagi diri sendiri dan orang lain.
9. Made Ika Lestari, wanita yang selalu bisa menjadi musuh, teman, sahabat, dan kekasih terbaik dalam perjalanan hidup penulis.

10. Seluruh teman – teman ‘AkS1’ angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua dukungan dan bantuannya selama ini.
11. Teman-teman di “Application Band”, “The Myth”, “LiV3”, dan “ASSScoustique” yang telah memberikan kesempatan berharga bagi penulis dalam menyalurkan *hobby* yang sedikit banyak telah mampu meredakan penat dunia perkuliahan.
12. Terakhir peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.

Astungkara Ida Sang Hyang Widhi Wasa, bantuan dari semua pihak akan mendapatkan balasan berupa pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, *svaha*. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan masyarakat.

“OM ÇHANTI ÇHANTI ÇHANTI OM”

Surabaya, Juli 2011

Penulis

ABSTRAKSI

Penelitian bertujuan untuk (1) mengeksplorasi tingkat kepatuhan organisasi nirlaba dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) (revisi 2007) serta persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan organisasi terhadap kewajiban penerapan standar pelaporan tersebut; dan (2) menyelidiki apakah ada perbedaan persepsi di antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali serta kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan organisasi tersebut untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan uji *Independent t-Test* dan *Mann-Whitney Test* dalam rangka menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 20% unit Palang Merah Indonesia di Provinsi Bali terkategori ‘Sangat Tidak Patuh’, 50% unit terkategori ‘Tidak Patuh’, dan 30% unit terkategori ‘Patuh’ dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45); dan (2) terdapat perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap penerapan PSAK 45, di mana kelompok penyusun laporan keuangan memberikan persepsi yang kurang baik/kurang setuju dan kelompok pengguna laporan keuangan memberikan persepsi yang baik/setuju terhadap penerapan PSAK 45.

Kata kunci: (PSAK 45, Organisasi Nirlaba, Penyusun Laporan Keuangan, Pengguna Laporan Keuangan, Kepatuhan, Persepsi)

ABSTRACT

This study aims to (1) explore the level of compliance of non-profit organization in implementing the PSAK (Statement of Financial Accounting Standards in Indonesia) No. 45 (Revised 2007) on Financial Accounting Non-Profit Organization and to understand the perception of compilers and users of financial statements about the obligation to implement those reporting standard; and (2) to investigate whether there are any perception differences between the groups compilers and users of financial statements. The resources of research data obtained through questionnaires to the Palang Merah Indonesia all across the province of Bali and constituent groups and users of financial statements of the organization then analyzed it in descriptive way and inferential test by using Independent t-Test and Mann-Whitney test in order to test the hypothesis which has been formulated. The results of the research showed that (1) 20% units of the Palang merah Indonesia in the province of Bali categorized as 'Absolute No Compliance', 50% units categorized as 'No Compliance', and 30% units categorized 'Obedience' in implementing PSAK (Statement of Financial Accounting Standards in Indonesia) No. 45 (Revised 2007) on Financial Accounting Non-Profit Organization; and (2) there is a difference of perception between the authors and users of financial statements on the application of PSAK 45, in which the constituent groups of the financial statements give the perception of poor/lack of agreed and user group financial statements give the perception of good/agree to the adoption of PSAK 45.

Key words: (PSAK 45, Non-Profit Organizations, Compilers of Financial Statements, Financial Statement Users, Compliance, Perception).

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAKSI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Skripsi	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Organisasi Nirlaba	12
2.1.2. Pelaporan Keuangan	18
2.1.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45)	29
2.1.4. Persepsi	38
2.2. Penelitian Sebelumnya	44
2.3. Hipotesis	46
2.4. Kerangka Berpikir	47
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	48
3.2. Identifikasi Variabel	49
3.3. Operasionalisasi Variabel	49
3.4. Jenis dan Sumber Data	50
3.5. Prosedur Pengumpulan Data	51
3.6. Teknik Analisis	56

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian	62
4.2. Pengujian Instrumen Penelitian	74
4.3. Analisis Statistik Deskriptif	80
4.4. Uji Normalitas Data	116
4.5. Uji Hipotesis	117

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	122
5.2. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbedaan Organisasi Bisnis dan Organisasi Nirlaba	14
Tabel 3.1.	Kriteria Kepatuhan	59
Tabel 3.2.	Kriteria Persepsi	60
Tabel 4.1.	Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.2.	Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	68
Tabel 4.3.	Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun Berdasarkan Lama Masa Kerja	69
Tabel 4.4.	Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pelatihan Kedinasan tentang Keuangan	69
Tabel 4.5.	Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun Berdasarkan Pengetahuan Berbasis Akuntansi yang Dimiliki	70
Tabel 4.6.	Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4.7.	Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	73
Tabel 4.8.	Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna Berdasarkan Lama Masa Kerja	74
Tabel 4.9.	Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pelatihan Kedinasan tentang Keuangan	74
Tabel 4.10.	Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna Berdasarkan Pengetahuan Berbasis Akuntansi yang Dimiliki	74
Tabel 4.11.	Uji Validitas (Tahap I) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengakuan	75
Tabel 4.12.	Uji Validitas (Tahap II) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengakuan	75

Tabel 4.13. Uji Validitas (Tahap III) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengakuan	76
Tabel 4.14. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengukuran	76
Tabel 4.15. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengungkapan	77
Tabel 4.15. Uji Validitas (Tahap I) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Penyajian	77
Tabel 4.17. Uji Validitas (Tahap II) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Penyajian	77
Tabel 4.18. Uji Validitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45 Kelompok Penyusun Laporan Keuangan	78
Tabel 4.19. Uji Validitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45 Kelompok Pengguna Laporan Keuangan	78
Tabel 4.20. Uji Reliabilitas	79
Tabel 4.21. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Provinsi Bali Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	81
Tabel 4.22. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	82
Tabel 4.23. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	83
Tabel 4.24. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	84
Tabel 4.25. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	85
Tabel 4.26. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	86
Tabel 4.27. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	88
Tabel 4.28. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	89

Tabel 4.29. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kota Denpasar Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	90
Tabel 4.30. Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45	92
Tabel 4.31. Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Palang Merah Indonesia Se-Provinsi Bali	94
Tabel 4.32. Jawaban Responden Kelompok Penyusun Laporan Keuangan Atas Variabel Persepsi Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	95
Tabel 4.33. Jawaban Responden Kelompok Pengguna Laporan Keuangan Atas Variabel Persepsi Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	95
Tabel 4.34. Jawaban Responden Kelompok Penyusun Laporan Keuangan Atas Variabel Persepsi Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45.....	100
Tabel 4.35. Jawaban Responden Kelompok Pengguna Laporan Keuangan Atas Variabel Persepsi Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45	100
Tabel 4.36. Jawaban Responden Kelompok Penyusun Laporan Keuangan Atas Variabel Persepsi Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45	104
Tabel 4.37. Jawaban Responden Kelompok Pengguna Laporan Keuangan Atas Variabel Persepsi Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45	104
Tabel 4.38. Persepsi Penyusun Laporan Keuangan Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	113
Tabel 4.39. Persepsi Pengguna Laporan Keuangan Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	115
Tabel 4.40. Hasil Uji Normalitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45 Kelompok Penyusun Laporan Keuangan	116
Tabel 4.41. Hasil Uji Normalitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45 Kelompok Pengguna Laporan Keuangan	116
Tabel 4.42. Hasil Uji t Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	117

Tabel 4.43. Hasil Uji t Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45	118
Tabel 4.44 Hasil Uji Mann - Whitney Test Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali	119
Tabel 4.45. Hasil Uji t Variabel Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	40
Gambar 2.2. Proses Organisasi Persepsi	42
Gambar 2.3. Bagan Kerangka Pemikiran	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian “Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45”
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian “Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45”
- Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Responden Kuesioner Penelitian “Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45”
- Lampiran 4 Tabulasi Jawaban Responden Kuesioner Penelitian “Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45”
- Lampiran 5 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kuesioner Penelitian “Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45”
- Lampiran 6 Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kuesioner Penelitian “Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45”
- Lampiran 7 Hasil Uji Validitas dan Uji Realibilitas Instrumen Penelitian
- Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas, Uji *Independent t-Test*, dan Uji *Mann-Whitney Test*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Organisasi adalah suatu unit aktivitas yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Menurut Mulyadi (2007:1) organisasi berisi orang-orang dengan kompetensi berbeda, saling tergantung satu sama lain dan berusaha mewujudkan kepentingan bersama dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Secara umum, organisasi didirikan dengan tujuan memperoleh laba (keuntungan) dan kelangsungan hidup yang berkesinambungan (*going concern*). Namun demikian, bukan berarti kemudian semua organisasi memiliki motif usaha yang sama yaitu untuk mencari laba sebesar-besarnya. Ada jenis organisasi yang didirikan dengan tidak berorientasi pada pencapaian laba, yaitu organisasi nirlaba.

Secara harafiah, organisasi nirlaba dapat diartikan sebagai organisasi yang menjalankan usahanya dengan tidak mengutamakan pada perolehan keuntungan (laba). Kegiatan operasionalnya lebih ditujukan dalam rangka pemberian pelayanan yang bersifat sosial kepada masyarakat. Menurut Glaeser dan Shleifer (1998), pada organisasi nirlaba tidak mengenal adanya pembagian keuntungan. Sebagai gantinya adalah hasil yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan kerja dalam bentuk pemberian insentif berupa waktu kerja yang pendek atau peningkatan produk yang diberikan. Organisasi nirlaba dapat beroperasi pada sektor swasta maupun publik. Organisasi nirlaba sektor

swasta antara lain museum, perpustakaan, serikat-serikat dagang, organisasi amal dan keagamaan, serta sebagian besar perguruan tinggi dan universitas (Boone & Kurtz, 2000:7). Dalam sektor publik contohnya adalah pemerintah nasional, pemerintah regional, pemerintah lokal dan entitas pemerintah terkait (misalnya perusahaan Negara atau komisi khusus). (www.keuanganlsm.com)

Perbedaan antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba secara jelas tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Disebutkan bahwa “perbedaan utama dan mendasar dari organisasi bisnis dan nirlaba adalah terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya” (IAI, 2009). Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari para anggotanya dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Hal lain yang kemudian juga membedakan antara organisasi nirlaba dan organisasi bisnis adalah dari sudut pandang penggunaan keuntungan (organisasi nirlaba menggunakan istilah ‘surplus’ untuk mengakui adanya kelebihan kas masuk dibandingkan kas keluar) yang diperoleh dari hasil usaha organisasi. Tidak seperti pada organisasi bisnis yang kemudian membagi-bagikan keuntungan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden, pada organisasi nirlaba surplus digunakan dalam rangka memperbesar skala pengabdian dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak (<http://www.scribd.com/doc/39109584/akuntansi-organisasi-nirlaba>).

Seperti halnya pada organisasi bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba tentunya juga memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban

pengelolaan, melalui penerbitan laporan keuangan sebagai suatu ukuran atas kinerja organisasi. Pelaporan keuangan merupakan alat komunikasi informasi Akuntansi antara manajemen dengan pihak luar, sebagai dasar untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Soetedjo, 2009:10). Karyawan, pemasok, investor, kreditor, pelanggan, dan pemerintah adalah pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan organisasi (IAI, 2009). Informasi yang didapat kemudian akan dimanfaatkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak berkepentingan tersebut dalam rangka perumusan suatu keputusan penting dan bahkan terkadang bersifat krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Melihat betapa pentingnya peran laporan keuangan suatu organisasi, maka sudah seharusnya penyusunannya dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku umum. Standardisasi pelaporan keuangan menjadi penting, agar ada kesamaan ukuran dalam menilai kelayakan suatu laporan keuangan. Juga, agar laporan keuangan itu dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan berdaya banding tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi organisasi nirlaba, permasalahan mengenai penyusunan laporan keuangan tentunya harus lebih mendapat perhatian, mengingat sifat dan karakteristiknya yang cenderung lebih 'sederhana' dibandingkan organisasi bisnis terutama dalam hal pencatatan transaksi keuangannya.

Menyikapi permasalahan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai badan pengembang standar Akuntansi di Indonesia, pada tahun 1997, menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan

Organisasi Nirlaba (PSAK 45). Standar ini disahkan pada 23 Desember 1997 dan efektif berlaku sejak 1 Januari 2000. PSAK 45 inilah yang sampai sekarang menjadi acuan baku bagi penyusunan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba di Indonesia yang memenuhi karakteristik sebagaimana telah disyaratkan dalam standar tersebut (www.iaiglobal.or.id).

Di dalam PSAK 45 telah disebutkan dengan rinci aturan dan bentuk penyusunan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba pada umumnya, yang terdiri dari: (1) penjelasan mengenai tujuan pembuatan laporan keuangan organisasi nirlaba, dan (2) penjelasan mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan.

Sehubungan dengan isu mengenai pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba di Indonesia, maka dilakukan penelitian pada sebuah organisasi perhimpunan nasional yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, yaitu Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia (PMI), adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Organisasi ini berperan dalam membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949

yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-undang Nomor 59 (www.pmi.or.id).

Sebuah pengamatan awal telah dilakukan pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng dan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali. Diperoleh fakta bahwa organisasi ini belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan hanya berbentuk laporan penerimaan dan pengeluaran serta realisasi anggaran yang masih sederhana. Ketika kemudian dilakukan konfirmasi berkaitan dengan PSAK 45, ditemukan indikasi minimnya pengetahuan para penyusun laporan keuangan atas standar pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba tersebut. Padahal, berdasarkan materi Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan Palang Merah Indonesia yang disajikan oleh Palang Merah Indonesia Pusat dalam pelatihan keuangan pengurus PMI pada tanggal 21-27 November 2010, Palang Merah Indonesia harus melaporkan laporan keuangan organisasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45). Pun, sebuah kasus berkaitan dengan transparansi pengelolaan organisasi juga sempat menyentil organisasi nirlaba berskala nasional ini. Terdapat dugaan adanya ‘mark-up’ anggaran pada Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung, khususnya dalam hal pengadaan barang. Kasus ini sempat membuat gerah manajemen organisasi dan juga mendapat sorotan serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang kemudian mendesak Inspektorat Kabupaten Badung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap

penggunaan anggaran di Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung (Bali Post, 20 Desember 2010).

Melihat betapa pentingnya peran Palang Merah Indonesia bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, alangkah baiknya bila organisasi ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan lebih baik lagi. Salah satu aspek yang mungkin dapat dikembangkan adalah dalam hal administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Bukan berarti berusaha mengkritisi dan mencari-cari kesalahan atas sistem pencatatan yang telah ada, namun lebih kepada tujuan pencapaian pertanggungjawaban yang lebih berkualitas. Karena bagaimanapun juga, baik organisasi nirlaba maupun organisasi bisnis sama-sama berada dalam 'pengawasan' pihak-pihak yang berkepentingan atas organisasi tersebut. Khusus untuk organisasi nirlaba, pelaporan keuangan akan memberikan informasi penting kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan berkenaan dengan pengalokasian sumberdaya kepada organisasi oleh pihak-pihak berkepentingan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi tingkat kepatuhan organisasi Palang Merah Indonesia dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 serta untuk mengetahui persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan atas penerapan standar tersebut. Pandangan penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam menyikapi isu penerapan PSAK 45 kemudian menjadi penting mengingat bahwa sejatinya laporan keuangan merupakan mediator kepentingan di antara kedua belah pihak atas eksistensi organisasi. Maka dari itu, sudah seharusnya terdapat persamaan

persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan atas penerapan PSAK 45 sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan. Dengan menggunakan teknik pelaporan keuangan serta persepsi pengguna dan penyusun laporan keuangan pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan seluruh Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali sebagai objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Akuntansi berkaitan dengan isu pelaporan keuangan organisasi nirlaba di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba?
- b. Bagaimana persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba?
- c. Adakah perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
- b. Untuk mengetahui persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
- c. Untuk menyelidiki adanya perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi subyek penelitian, dalam hal ini Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali, dapat memperoleh pengetahuan mengenai adanya standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu PSAK No. 45 serta memahami tingkat

penerapan yang telah dilaksanakan. Organisasi juga akan memperoleh informasi mengenai kebutuhan para pengguna laporan keuangan berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi organisasi.

- b. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 5 (lima) bab. Secara garis besar kerangka dari pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Pada bagian pendahuluan, dipaparkan latar belakang masalah yang secara garis besar memberikan gambaran umum mengenai dasar dan alasan dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan atas eksistensi Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali sebagai sebuah organisasi nirlaba dan keinginan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Palang Merah Indonesia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melalui penerapan standar pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Juga, untuk mengetahui bagaimana persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan atas penerapan PSAK 45 pada organisasi tersebut.

Bagian selanjutnya berisi teori-teori serta konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serta analisa penelitian. Teori-teori yang dijelaskan dalam bab ini meliputi pengertian organisasi nirlaba beserta sifat dan karakteristiknya serta pelaporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Ditambahkan juga dengan teori-teori keagenan dan persepsi.

Bab ketiga merupakan bagian Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan, desain penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisa yang digunakan. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey, yaitu melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Hasil penelitian bersifat deskriptif yang akan menjelaskan sampai sejauh mana PSAK 45 diterapkan di Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dan bagaimana persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap penerapan standar tersebut. Studi literature dilakukan dengan mengambil referensi dari beberapa sumber seperti buku-buku teks Akuntansi serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan menggunakan data-data primer yang diperoleh dari subyek penelitian

Pada bab Hasil Penelitian dan Pembahasan diberikan gambaran umum dari subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum subyek penelitian menggambarkan profil singkat organisasi Palang Merah

Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Digambarkan pula hubungan fungsional antara Palang Merah Indonesia dan instansi-instansi pemerintahan terkait yang juga menjadi subyek dalam penelitian ini. Pada deskripsi hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bagaimana kepatuhan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba serta persepsi para penyusun dan pengguna laporan keuangan atas penerapan standar tersebut.

Bagian terakhir dari penelitian ini adalah bab Kesimpulan dan Saran. Bagian ini berisi kesimpulan atas seluruh pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan, serta saran dan masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi subyek penelitian dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Organisasi Nirlaba

Ketika mendengar kata ‘organisasi’, dalam benak sebagian orang biasanya akan langsung tergambar profil sebuah perkumpulan massa dengan beranggotakan orang-orang yang melakukan aktivitas bersama demi suatu tujuan tertentu. Paradigma ini tak sepenuhnya salah, namun tidak sebaiknya dipertahankan. Ada batasan-batasan tertentu yang membuat sebuah ‘organisasi’ benar-benar bisa dikatakan sebagai organisasi, yaitu (1) adanya struktur atau jenjang jabatan, kedudukan, dan posisi yang jelas dapat dibedakan serta (2) adanya pembagian kerja yang memungkinkan setiap elemen dalam individu memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya (www.anneahira.com).

“Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu” (Armosudiro dalam <http://id.shvoong.com>). Mulyadi (2007:1) mengatakan bahwa organisasi berisi orang-orang dengan kompetensi berbeda, saling tergantung satu sama lain dan berusaha mewujudkan kepentingan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi beranggotakan orang-orang yang bersama-sama memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki

dalam suatu hierarki wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas demi mewujudkan suatu tujuan yang sama.

Lebih jauh, berdasarkan atas tujuan pendiriannya, organisasi dapat dibedakan menjadi organisasi bisnis (yang berorientasi pada perolehan keuntungan) dan organisasi nirlaba (yang berorientasi pada pelayanan sosial). Bersama-sama, kedua jenis organisasi ini telah memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Sabeni dan Gozali (1995:5-6), organisasi nirlaba dan organisasi bisnis memiliki beberapa kesamaan, yaitu (1) merupakan bagian dari suatu sistem ekonomi yang sama dan menggunakan sumber daya yang sama pula untuk memenuhi tujuannya; (2) menggunakan sumber daya yang langka untuk menciptakan barang dan jasa; (3) memiliki proses manajemen keuangan yang sama; (4) sama-sama memerlukan analisis biaya dan pengendalian biaya guna menetapkan bahwa sumber daya yang langka tersebut telah digunakan secara efisien dan efektif; dan (5) kedua jenis organisasi tersebut dapat menghasilkan produk yang sama, seperti pemerintah maupun perusahaan komersial yang keduanya dapat mengelola sistem transportasi, sanitasi, listrik dan sebagainya.

Di sisi lain, dalam beberapa hal, terdapat perbedaan mendasar antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Seperti ditampilkan pada Tabel 2.1, Gross, Jr and William dalam Darmasari (2005:15) menjabarkan secara ringkas perbedaan-perbedaan tersebut.

Tabel 2.1

Perbedaan Organisasi Bisnis dan Organisasi Nirlaba

Hal Perbedaan	Organisasi Bisnis	Organisasi Nirlaba
Tujuan Organisasi	Menentukan laba bersih (<i>net income</i>) dan untuk mendapatkan laba per lembar saham (<i>earning per share</i>) yang setinggi-tingginya	Menghimpun dana dan menggunakannya untuk masyarakat secara keseluruhan
Sumber Dana	Perseorangan atau sekelompok orang yang berbentuk sejumlah modal yang disetor (<i>invested capital</i>) untuk memperoleh pendapatan	Berbagai sumber yang digunakan untuk berbagai macam tujuan tanpa adanya penekanan pada penentuan laba
Peraturan dan Pengendalian Barang dan Jasa	Barang dan jasa ditawarkan kepada konsumen umum, dan barang dan jasa tersebut akan ditarik kembali apabila tidak menguntungkan lagi	Menyediakan barang dan jasa yang tidak ada harga pasarnya dan ini dapat digunakan sebagai pengukur kepuasan konsumen karena barang dan jasa tersebut bersifat unik

Sumber: Darmasari, Shinta. 2005. *Manfaat Akuntansi Dana Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Gereja*. Skripsi diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Di tengah perbedaan-perbedaan yang dimiliki, organisasi bisnis dan organisasi nirlaba, bersama-sama dengan elemen pemerintah dan masyarakat, merupakan media yang seharusnya dapat saling bersinergi guna menyongsong pembangunan di Indonesia (Gunawan, dkk, 2005). Keduanya adalah sebuah bagian yang terikat kuat dan saling mempengaruhi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan penelaahan objek pada organisasi dalam bentuk nirlaba. “Secara umum, organisasi nirlaba (*Non-for-Profit Organization*) adalah suatu institusi yang dalam menjalankan operasinya

tidak berorientasi mencari laba” (<http://id.shvoong.com>). Istilah ‘nirlaba’ kemudian diartikan sebagai “(suatu kegiatan usaha) yang bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan/laba” (KBBI, ed. 3, 2001). Namun, perlu kemudian digarisbawahi bahwa organisasi ini tetap diperkenankan untuk menerima atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktivitasnya. Hanya saja, jika memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut biasanya dipergunakan untuk menutup biaya operasional atau kembali disalurkan untuk kegiatan utamanya lagi. Menurut Madura (2007:9) pada organisasi nirlaba, “... ketika pendapatan melampaui bebannya di periode tertentu, laba tersebut diinvestasikan kembali di organisasi tersebut”.

Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, organisasi nirlaba telah banyak memberikan andil besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Namun memang, keberadaannya seakan-akan ‘terisolasi’ dan cenderung tidak diacuhkan oleh masyarakat. Ini masuk akal karena memang pengetahuan akan eksistensi nirlaba masih tergolong minim. Padahal faktanya, organisasi nirlaba telah lama ada, tumbuh, dan berkembang seiring perkembangan jaman. Kusnadi, dkk (1999:9) memberikan beberapa karakteristik unik dari organisasi nirlaba. Dikatakan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi milik umum yang tidak dapat diidentifikasi secara jelas melalui tanda kepemilikan khusus seperti surat saham, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Organisasi ini tidak bertujuan mencari laba finansial akan tetapi bertujuan mencari laba sosial (*non financial*) sehingga jika jangkauan layanan luas dan yang dilayani memperoleh kesejahteraan maka organisasi dapat dikatakan

telah berfungsi dengan baik. Selanjutnya, dana yang diperoleh oleh organisasi ini bersifat sukarela yang didorong oleh motivasi holistik dan berasal dari anggota atau pihak simpatisan atau dari Negara yang tidak berkaitan langsung dengan transaksi. Demikian pula dengan motivasi kerja para anggota organisasi. Mereka melakukan pekerjaan bukan semata-mata karena pertimbangan ekonomi akan tetapi lebih didasarkan kepada tuntutan holistik yang sangat diimani akan diperoleh balasan yang layak di sisi Tuhannya. Terakhir, berbeda dari organisasi bisnis, ukuran keberhasilan organisasi nirlaba tidak semata-mata pada pertumbuhan aktiva atau pertumbuhan dana yang diperoleh akan tetapi lebih terfokus kepada realisasi ide (gagasan) yang akan ditegakkan.

Kemudian, mengutip pendapat Anthony dan Young, Salusu (2005) menambahkan adanya dominasi profesional dan kecenderungan orientasi pelayanan pada setiap aktivitas organisasi nirlaba. Dengan demikian tampak jelas bahwa eksistensi suatu organisasi nirlaba senantiasa dijiwai oleh semangat sosial, bukan motif ekonomi semata. Pengelolooannya dijalankan oleh tenaga-tenaga ahli yang kompeten di bidangnya dan berdasar atas pelayanan bagi kepentingan umum. Sumber daya yang digunakan berasal dan ditujukan bagi pihak yang sama, yaitu masyarakat.

Terdapat berbagai bentuk organisasi yang dapat dikatakan memiliki karakteristik sebagai sebuah organisasi nirlaba. Kotler dalam Salusu (2005:24-25) merinci badan-badan yang dapat digolongkan ke dalam organisasi nirlaba, yaitu (1) organisasi keagamaan; (2) organisasi sosial seperti klub-klub jasa, organisasi kekerabatan; (3) organisasi-organisasi kebudayaan seperti museum, simponi,

usaha pagelaran seni tari, kelompok seni, kebun binatang, olahraga; (4) organisasi di bidang ilmu pengetahuan seperti sekolah-sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, lembaga-lembaga penelitian; (5) organisasi-organisasi proteksi seperti asosiasi perdagangan; (6) organisasi-organisasi politik; (7) organisasi-organisasi filantropik seperti organisasi-organisasi kesejahteraan sosial, yayasan-yayasan swasta, rumah sakit, rumah-rumah perawatan; serta (8) organisasi sosial pembela dan pelindung seperti kelompok perdamaian, kelompok keluarga berencana, kelompok-kelompok yang berkaitan dengan lingkungan, kelompok hak azasi, lembaga konsumen, kelompok hak-hak wanita, kelompok anti-korupsi.

Menurut Sabeni dan Gozali (1997, 4-5), organisasi nirlaba dapat termanifestasi dalam beberapa sektor. Misalnya di pemerintahan (*Governmental*), yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga pendidikan (*Educational*) seperti sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, dan perguruan tinggi. Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan (*Hospital and Welfare*) juga banyak ditemukan bentuk-bentuk organisasi nirlaba, sebut saja rumah sakit, puskesmas, poliklinik, Palang Merah Indonesia, dan panti asuhan yatim piatu. Organisasi-organisasi keagamaan (*Religious*) seperti masjid, pondok pesantren, Gereja, vihara, dan kuil serta lembaga amal (*Charitable*) misalnya yayasan jantung sehat, yayasan ginjal, dan yayasan amal lainnya juga dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari filosofi sebuah organisasi nirlaba. Contoh lainnya adalah lembaga-lembaga dana (*Foundation*); yaitu lembaga yang dikelola untuk memberikan dana bagi lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan lembaga amal.

Lebih jauh, Oleck (1988) dalam Salusu (2005) menyatakan bahwa organisasi nirlaba juga dapat dibedakan berdasarkan pemanfaatan keuntungannya dan digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu (1) *public benefit*, yang keuntungannya dinikmati oleh masyarakat umum, contohnya museum, sekolah, dan rumah sakit; (2) *mutual benefit*, yang keuntungannya dinikmati secara bersama, contohnya koperasi, perhimpunan profesi, dan klub-klub; dan (3) *private benefit*, yang mencari keuntungan hanya untuk membiayai belanja rutin dan pemeliharaan.

Begitu banyak bentuk organisasi nirlaba yang kini ada. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki dan perbedaan filosofi yang membentuknya, tak bisa dipungkiri bahwa organisasi nirlaba telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumah sakit, universitas, organisasi keagamaan dan partai politik adalah beberapa contoh organisasi nirlaba yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Tak ada yang bisa menolak fakta jika keberadaannya telah banyak memberikan solusi terhadap kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Sedemikian besarnya peran organisasi nirlaba sehingga sangat diharapkan pengelolaannya dapat dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

2.1.2. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan meliputi segala proses yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Menurut Syahrul dan Nizar (2000:717), “pelaporan adalah kegiatan memberikan informasi keuangan

kepada pihak lain secara berkala untuk membantu dalam pengendalian atau pengambilan keputusan.” Istilah lain yang identik adalah penyajian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyajian merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan menyajikan. Penyajian suatu laporan keuangan kemudian dimaksudkan bagaimana laporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan itu diungkapkan melalui berbagai cara pengungkapan (Harahap, 2007:267).

Untuk semua jenis organisasi, pelaporan mutlak diperlukan sebagai suatu bentuk nyata pertanggungjawaban kinerja. Juga, sebuah pelaporan akan sangat membantu pihak manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, karena dapat memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi organisasi. Semakin baik kualitas informasi yang didapat, semakin kecil pula faktor resiko kesalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pelaporan yang dimaksud dapat berupa pelaporan kegiatan usaha, pelaporan penggunaan dana (realisasi anggaran), atau pelaporan harta yang dimiliki dalam bentuk daftar inventarisasi.

Proses pelaporan atau penyajian sebuah laporan keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang berjalan terus menerus dan berulang kembali sehingga membentuk suatu siklus, yang kemudian dikenal dengan Siklus Akuntansi. Proses ini pada dasarnya terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ketiga aktivitas tersebut kemudian harus senantiasa dilandasi oleh

prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian.

a. Pengakuan

Yadiati (2007:63) menyatakan bahwa pengakuan merupakan proses pencatatan formal atau mencatat *item-item* tertentu atau dengan kata lain, mencatat jumlah rupiah suatu *item* yang harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Lebih lanjut, menurut Yadiati (2007:63) suatu item dapat diakui ketika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Definisi (*Definitions*), artinya item-item tersebut harus memenuhi unsur-unsur laporan keuangan.
- (2) Keterukuran (*Measureability*), artinya item-item tersebut harus mempunyai atribut yang relevan dengan tingkat keandalan yang tinggi atau untuk menentukan keandalan daya ujinya.
- (3) Relevan (*Relevance*), artinya informasinya harus mendukung dan memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan.
- (4) Dapat diandalkan (*Reliability*), artinya informasinya menyajikan keadaan yang sebenarnya, wajar, jujur, berdaya uji, dan netral.

b. Pengukuran

Bastian (2006:109) memberikan pengertian pengukuran sebagai “proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan”. Terdapat berbagai dasar yang digunakan dalam melakukan suatu pengukuran seperti diungkap oleh Yadiati (2007:64-65), yaitu:

- (1) Nilai perolehan (*historical cost*), yaitu semua barang dan jasa dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehannya, yaitu jumlah kas atau ekuivalennya yang dibayarkan pada saat memperoleh barang dan jasa tersebut. Contohnya adalah perolehan aktiva tetap. *Historical cost* di sini dijadikan basis dalam struktur pelaporan keuangan
- (2) Nilai sekarang atau nilai penggantinya (*current or replacement cost*), yaitu pengukuran yang didasarkan pada nilai sekarang saat ini, bukan nilai masa lalu, atau dengan nilai penggantinya, contohnya persediaan.
- (3) Nilai pasar sekarang (*current market value*), yaitu pengukuran yang berdasarkan pada harga pasar yang berlaku saat ini, yaitu sejumlah kas atau ekuivalennya yang akan diperoleh seandainya aktiva tersebut dijual. Contohnya adalah surat berharga.
- (4) Nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*), yaitu pengukuran yang berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sejumlah uang kas atau ekuivalennya yang diharapkan akan diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya langsungnya. Contoh *item* yang menggunakan penilaian ini adalah piutang dagang.
- (5) Arus kas masa depan yang didiskontokan (*discounted future cash flow*), yaitu nilai diskontoan dari *future cash flow* di masa yang akan datang yang diharapkan diperoleh sekarang (*present value*). Bisa juga diartikan berapa nilai sekarang dari jumlah arus kas di masa yang akan datang. Contohnya adalah piutang jangka panjang atau hutang jangka panjang dapat diukur dengan nilai ini.

c. Pengungkapan

Pengungkapan menurut Kieso, *et al* (2001:56) merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa praktik yang umum dilakukan dalam memutuskan informasi apa yang akan dilaporkan adalah menyediakan informasi yang mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Biasanya, suatu entitas melakukan sebuah pengungkapan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan dan informasi siplementer.

- (1) Catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statements*), umumnya ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Jika informasi dalam bagian utama laporan keuangan menyajikan gambaran yang tidak lengkap menyangkut kinerja dan posisi keuangan perusahaan, maka informasi tambahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap harus dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya, penjelasan tentang kebijakan akuntansi dan metode yang dipakai untuk mengukur unsure-unsur yang dilaporkan dalam laporan penjelasan mengenai ketidakpastian dan kontijensi, serta statistic dan rincian yang terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam bagian utama laporan. Catatan atas laporan keuangan tidak hanya membantu tetapi juga penting untuk memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan.
- (2) Informasi suplementer (*supplementary information*), dapat mencakup rincian atas jumlah yang merupakan perspektif yang berbeda dan yang digunakan dalam laporan keuangan. Informasi ini bisa berupa informasi kuantitatif yang

sangat relevan tetapi realibilitasnya rendah, atau bisa berupa informasi yang dapat membantu tetapi tidak penting.

d. Penyajian

Menurut Bastian (2006:215), penyajian merupakan proses menyajikan data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar yang akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan surplus-defisit (laporan kinerja keuangan), dan laporan arus kas

Lebih jauh, laporan keuangan merupakan alat komunikasi antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dan penyaji laporan keuangan dengan pihak lain sebagai pemakai laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Paragraf 7, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Ditambahkan lagi, laporan keuangan disusun dengan tujuan (1) menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi; (2) memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, walaupun tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan; (3) menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009).

Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu memberikan informasi yang paling tepat sehubungan dengan kebutuhan para pemakainya. Statement of Financial Accounting Concept Nomor 2 (SFAC 2), mensyaratkan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan dua batasan (*constraint*) yaitu *Cost-Benefit (Pervasive Constraint)* dan *Materiality (Threshold for Recognition)*. Prinsip dalam batasan pertama menyatakan bahwa *cost* (biaya) dalam menyediakan laporan keuangan harus ditimbang dengan *benefit* (manfaat) yang di dapat dari menggunakan laporan tersebut. Selanjutnya, AICPA Special Committee membuat beberapa batasan dalam rangka efisiensi biaya pelaporan, yaitu bahwa laporan tidak harus memuat informasi di luar kemampuan manajemen atau yang mana manajemen bukan sumber terbaik dari laporan tersebut, sebagai contoh laporan mengenai kompetitor. Manajemen juga tidak diharuskan melaporkan informasi yang secara signifikan akan merugikan posisi kompetisi perusahaan. Kemudian, manajemen tidak harus diminta untuk menyediakan *forecasted financial statements*, manajemen hanya menyediakan informasi yang membantu *user* meramalkan sendiri kondisi keuangan perusahaan di masa datang. Ditambahkan lagi, sesuai konsep *flexible reporting*, beberapa elemen dari laporan keuangan harus dilaporkan apabila *user* dan manajemen setuju untuk dilaporkan.

Batasan kedua berhubungan dengan pengaruh penyajian sebuah item dalam operasi keuangan sebuah perusahaan. Pengaruh yang dimaksud adalah bagaimana kemudian informasi yang tersaji dalam laporan keuangan akan berkontribusi dalam sebuah pengambilan keputusan. Hal ini dikenal dengan

konsep materialitas, yaitu besarnya salah saji informasi Akuntansi yang dapat mengakibatkan perubahan pertimbangan seseorang yang berkepentingan atas informasi tersebut. Indikator yang kemudian harus dipenuhi dalam konsep materialitas adalah adanya relevansi (*Relevance*) pada laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran masa lalu dan masa depan sebuah entitas serta bersifat tepat waktu. Indikator kedua adalah terpenuhinya unsur realibilitas (*Reliability*), yaitu kepastian bahwa angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi, memberikan keyakinan objektif atas isinya, dan bersifat netral.

Sesuai dengan konsep awal pelaporan keuangan, maka memang sudah seharusnya sebuah laporan keuangan disusun dan disajikan dengan baik dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemakai atas informasi-informasi penting organisasi. Investor, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya adalah pihak-pihak eksternal yang secara langsung membutuhkan informasi mengenai produktivitas suatu organisasi. Informasi tersebut terutama berkaitan dengan sampai sejauh mana organisasi berhasil mengelola 'kekayaan' yang disertakan oleh pihak-pihak eksternal dan telah menjadi bagian penting dalam operasional organisasi. Di sisi lain, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakilinya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat adalah pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi organisasi lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan jaminan sosial yang diberikan (IAI, 2009).

Prastowo (2002:7) kemudian memberikan beberapa faktor yang dapat membantu untuk membuat tanggapan dari para pembaca laporan, yaitu (1) laporan

harus tepat waktu; (2) laporan harus sederhana dan jelas; (3) laporan harus dinyatakan dalam bahasa dan istilah yang dikenal oleh pimpinan yang akan memakainya; (4) informasi harus disajikan dalam urutan yang logis; (5) laporan harus akurat; (6) bentuk penyajian harus disesuaikan dengan pimpinan yang akan menggunakannya; (7) selalu diStandardisasi, apabila mungkin; (8) rancangan laporan harus mencerminkan sudut pandang pimpinan; (9) laporan harus berguna; (10) biaya penyiapan laporan harus dipertimbangkan; dan (11) perhatian yang diberikan untuk penyiapan laporan harus sebanding dengan manfaatnya.

Hubungan yang erat antara penyusun dan pengguna laporan keuangan juga dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip dalam *Agency Theory* (Teori Keagenan). Seperti dijelaskan Elqorny dalam <http://elqorni.wordpress.com>, prinsip utama Teori Keagenan ini adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". Yang kemudian dimaksud dengan "*nexus of contract*" adalah bahwa di dalam perusahaan terdapat sekumpulan kontrak timbal balik yang memfasilitasi hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan berbagai partisipan lainnya yang terkait dengan perusahaan (www.iicg.org). Perusahaan atau organisasi adalah sebuah sistem yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal, keahlian, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang.

Permasalahan kemudian biasanya muncul saat principal (pemilik modal) memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada agen (manajer) untuk

mengelola modal yang disertakannya. Ketika ini terjadi, prinsipal akan tidak memiliki jaminan bahwa agen tidak akan mengalokasikan modal tersebut untuk investasi atau proyek yang tidak menguntungkan. Sementara perusahaan adalah tempat bersinerginya kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pemilik modal dan manajer, tidak bisa dipastikan bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik modal. Keduanya tak jarang memiliki ‘kepentingan ekonomis’ yang saling bertolak belakang. Prinsipal menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan agen menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Kecenderungan yang kemudian muncul dalam kaitannya dengan aspek pertanggungjawaban pengelolaan adalah manajer terkadang melakukan suatu ‘rekayasa’ atas kondisi riil perusahaan. Karena kompensasi atau insentif yang diharapkan didapat oleh manajer ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, manajer akan berusaha meyakinkan pemilik modal bahwa kondisi tersebut dapat selalu terpenuhi. Manajer bisa saja memanipulasi data-data Akuntansi yang dilaporkan untuk menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan berada dalam suatu tren yang positif. Ini dapat dilakukan karena hanya manajerlah yang mengetahui dengan baik kondisi perusahaan, yang kemudian dikenal dengan istilah asimetri informasi, dibandingkan pemilik modal. Ini merupakan suatu konflik kepentingan akut yang tak seharusnya dibiarkan

berlarut-larut karena justru nantinya dapat berimbas negatif pada kelangsungan kerja sebuah organisasi.

Itikad baik oleh semua pihak sudah sepantasnya harus senantiasa mendasari suatu hubungan kerja. Bagaimanapun juga, sebuah organisasi mengandalkan semua elemen yang terkandung di dalamnya untuk dapat bertahan hidup. Dibutuhkan komitmen yang tinggi di antara semua pihak yang terlibat untuk memajukan suatu organisasi. Dalam mencegah dan meminimalkan pengaruh negatif konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* pada organisasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam setiap 'proses bisnis' pada organisasi dalam bentuk apapun, agar memungkinkan pengawasan dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi (<http://elqorni.wordpress.com>).

Laporan keuangan nyatanya memang bukan hanya sekedar tumpukan kertas laporan hasil kinerja periodik yang seakan-akan telah menjadi pekerjaan rutin pihak manajemen. Bukan pula sekedar kumpulan angka-angka kesuksesan pengelolaan kekayaan organisasi sebagai pemenuhan kewajiban terhadap *stakeholder*. Laporan keuangan lebih merupakan sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan strategik yang akan berpengaruh signifikan bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi. Manajemen sebagai pihak penyusun laporan keuangan, sudah seharusnya memberikan kemampuan dan pengetahuan terbaiknya dalam menyajikan sebuah laporan keuangan. Standar pelaporan

keuangan yang berlaku umum, memang sangat perlu diterapkan guna mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

2.1.3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45)

Organisasi nirlaba terdiri atas entitas pemerintahan dan entitas non-pemerintahan. Organisasi nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi bisnis oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Walaupun demikian, kegiatan pertanggungjawaban harus tetap dilaksanakan, seperti halnya pada organisasi bisnis. Pada umumnya organisasi nirlaba non-pemerintahan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. PSAK 45 (untuk entitas nirlaba nonpemerintah) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba non-pemerintah. Diluar itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dapat menyusun standar khusus nirlaba, misalnya akuntansi untuk entitas koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik Akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan, seperti kreditur dan sebagainya (<http://meryna.web.id>). Seperti diuraikan Sucipto (2003), Standar Akuntansi Keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan juga diharapkan dapat memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik

agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Pihak pemerintah sebagai sebuah lembaga pengawas juga akan mendapat manfaat dari laporan keuangan yaitu berupa database informasi perusahaan yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan makro lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 selanjutnya secara khusus membahas tentang pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ditandai dengan adanya perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (asset) dari penyumbang yang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik berupa perolehan sumber daya entitas yang berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Ketentuan lain, organisasi merupakan entitas yang menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Status kepemilikannya tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba.

a. **Laporan Posisi Keuangan**

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa secara berkelanjutan serta tingkat likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti:

- a) kas dan setara kas;
- b) piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;

- c) persediaan;
- d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;
- e) surat berharga/efek dan investasi jangka panjang;
- f) tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
- g) kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya.

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

Pembatasan permanen terhadap (1) aktiva, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau (2) aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (*endowment*).

Pembatasan temporer terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4) pemerolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara

temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya.

Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (1) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (2) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (3) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara

fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota.

c. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dalam penyajiannya, laporan arus kas disajikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 (PSAK 2) tentang Laporan Arus Kas, dengan mengklasifikasikannya menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut ini:

- (1) Metode langsung di mana kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran bruto diungkapkan.
- (2) Metode tidak langsung di mana laba rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*deferral*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan

masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Seperti disebutkan sebelumnya, laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan adanya tambahan sebagai berikut:

- a) Aktivitas pendanaan:
 - i. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - ii. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).
 - iii. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, contohnya sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah “penjelasan yang dilampirkan bersama-sama dengan laporan keuangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan neraca, perhitungan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan” (Nurdiono, 2007:24). Diungkapkan kemudian oleh Bastian (2006:249) bahwa catatan atas laporan keuangan entitas harus (1) menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta diterapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya; (2) mengungkapkan informasi

yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto; dan (3) menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan-persyaratan wajar yang ditetapkan.

Indonesia adalah Negara hukum yang mewajibkan setiap warga negaranya untuk bertingkah laku, baik melakukan perbuatan hukum atau tidak, dengan harus menaati segala peraturan yang berlaku. Sebagaimana peraturan-peraturan lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan ketentuan umum berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan entitas yang harus ditaati. PSAK adalah produk hukum yang lahir sebagai sebuah tanggapan atas kondisi ekonomi Indonesia pada rentang tahun 1973 menjelang diaktifkannya pasar modal saat itu. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku 'Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)' (www.iaiglobal.or.id).

Kewajiban penerapan PSAK untuk pelaporan keuangan suatu entitas dapat ditelusuri dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan pemerintah. Pada pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa "Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum". Demikian pula seperti dijabarkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Pada bagian 1 (b) disebutkan "... bentuk, isi dan persyaratan dalam

penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalam peraturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ...”

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang PSAK adalah suatu aturan baku yang wajib diterapkan dalam hal pelaporan keuangan sebuah organisasi. Demikian pula dengan organisasi dalam bentuk nirlaba, harus patuh pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Kepatuhan atas penerapannya diharapkan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi para pemakainya.

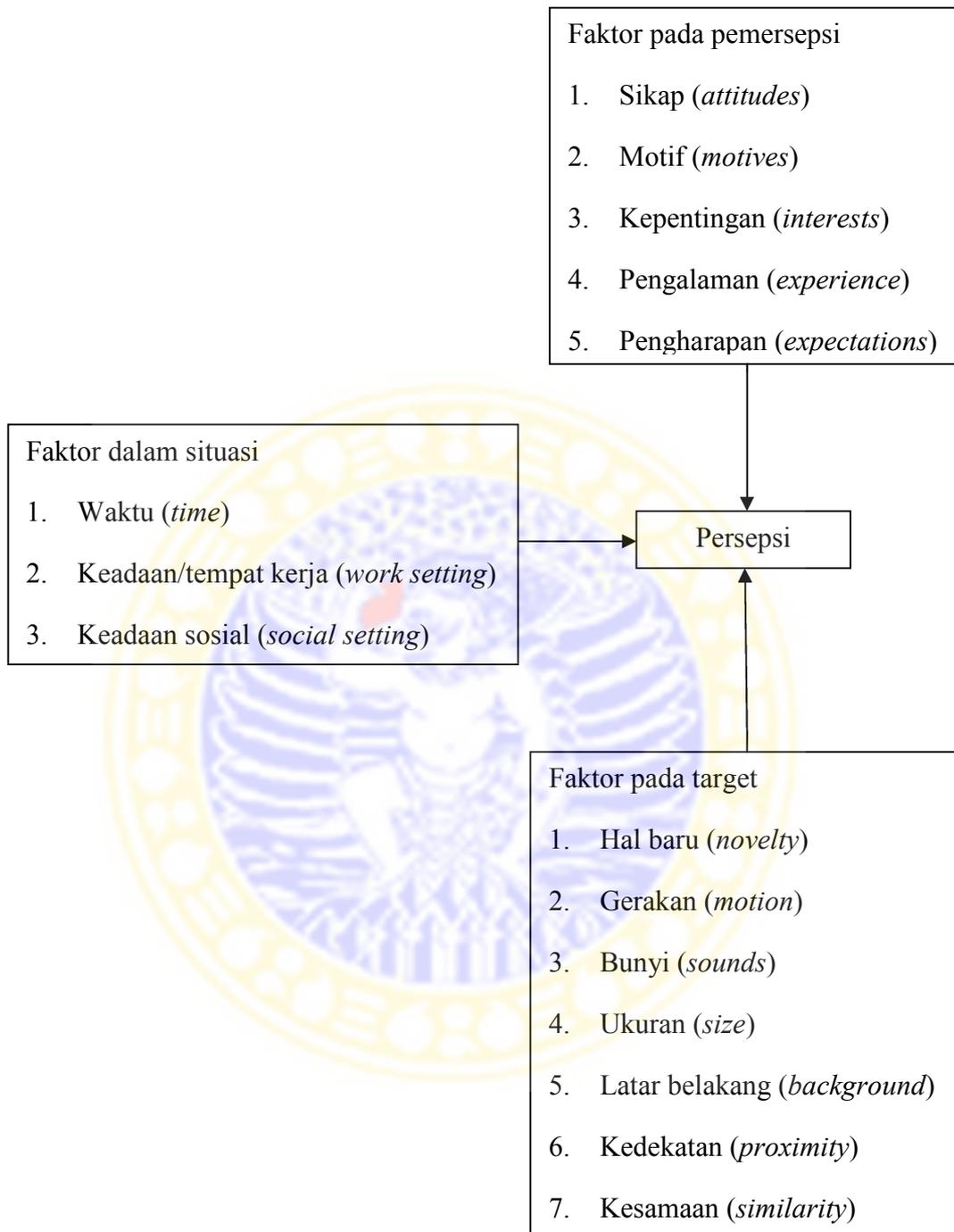
2.1.4. Persepsi

Ketika menghadapi suatu permasalahan atau memandang suatu hal, masing-masing individu akan menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk menyikapinya. Ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi pada masing-masing individu tersebut. Persepsi dapat dijelaskan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka (Robbins, 2003:123). Winardi (2001) mengemukakan persepsi merupakan proses yang bermanfaat sebagai filter dan metode untuk mengorganisasikan stimulus, yang memungkinkan seseorang menghadapi lingkungannya. Organ dan Bateman (1986:47) mendefinisikan persepsi sebagai proses seleksi, organisasi, penyimpanan, dan interpretasi rangsangan sensoris menjadi suatu gambaran tentang dunia sekitar yang bermakna dan utuh.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu kegiatan menafsirkan sesuatu objek yang ada di lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses adaptasi dan menghasilkan pemahaman yang bersifat pribadi atas objek tersebut. Pembentukan persepsi dapat dikatakan sebagai langkah awal proses interaksi antara manusia dan lingkungannya karena persepsi yang dimiliki akan membimbing sikap dan tanggapan seseorang terhadap apa yang ada di lingkungannya tersebut.

Persepsi seseorang atas suatu objek tidak serta merta terbentuk dan pastinya juga akan berbeda antar individu. Perbedaan-perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana dijelaskan Robbins (2003:125), yaitu adanya karakteristik pribadi yang dimiliki masing-masing individu (*perceiver*). Karakteristik tersebut contohnya adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Faktor lingkungan (*situation*) di mana seseorang berinteraksi juga dapat memberikan pengaruh relevan bagi pembentukan persepsi. Lokasi, keadaan cuaca, faktor situasional dan suhu bisa jadi mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Terakhir adalah faktor sasaran (*targets*) itu sendiri. Seseorang cenderung melakukan suatu pengelompokan terhadap objek-objek yang tampak serupa satu sama lain. Semakin banyak hal-hal identik yang ditemukan pada beberapa objek, semakin besar kemungkinan objek-objek tersebut dipersepsikan sebagai suatu kelompok bersama. Hubungan antara faktor-faktor sebagaimana disebutkan oleh Robbins tersebut selanjutnya dijelaskan dalam gambar 2.1.

Baltus (1983), juga memberikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi



Sumber: Stephen P. Robbins. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep. Kontroversi. Aplikasi*. Edisi Kedelapan. Terjemahan oleh Pujaatmaka dan Benyamin Molan. 2001. Jakarta: PT. Prenhallindo

Gambar 2.1

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

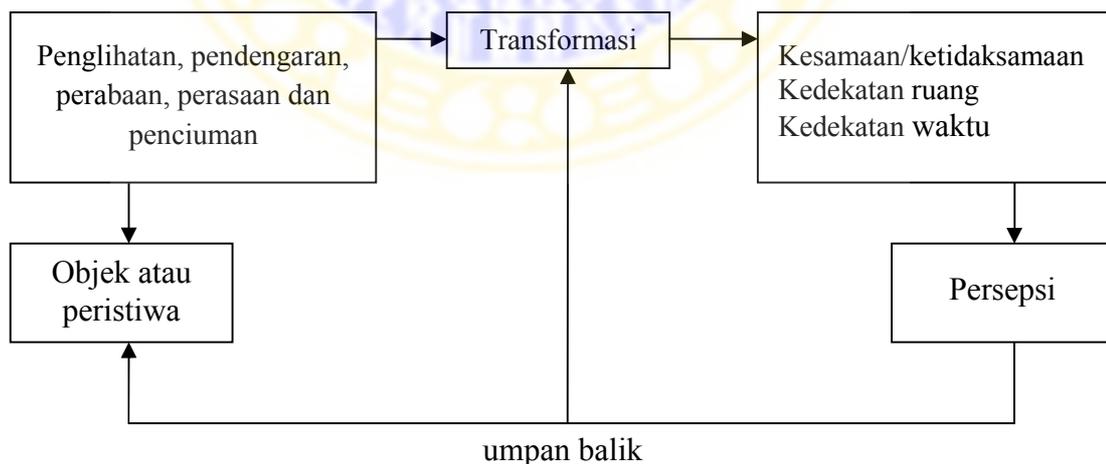
persepsi yaitu berkaitan dengan kemampuan serta keterbatasan fisik dan alat indera seseorang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi untuk sementara waktu atau permanen. Pengalaman masa lalu juga dapat menentukan bagaimana cara individu untuk menginterpretasikan atau bereaksi terhadap stimulus. Di lain pihak, ketika seorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu maka ia akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan tersebut. Kepercayaan, prasangka dan nilai juga memberikan andil dalam pembentukan persepsi seseorang. Individu akan lebih memperhatikan dan menerima orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengannya. Sedangkan prasangka dapat menimbulkan bias dalam mempersepsi sesuatu.

Proses terbentuknya persepsi merupakan suatu rangkaian yang sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang. Ini terjadi ketika orang tersebut mendengar, mencium, melihat, merasa atau bagaimana orang tersebut memandang suatu objek yang melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Jadi jelas bahwa persepsi seseorang terbentuk sebagai sebuah respon yang sifatnya pribadi berdasarkan karakteristik unik masing-masing individu. Inilah yang kemudian membuat apa yang dipersepsikan seseorang terhadap perilaku orang lain akan berbeda antara manusia yang satu dengan lainnya karena bersifat sangat subyektif.

Luthans (1998:104) menjelaskan bahwa hal terpenting dalam sebuah proses pembentukan persepsi adalah adanya stimulus yang terjadi. Stimulus diterima individu melalui indera yang terdapat dalam dirinya, yang memiliki fungsinya tersendiri. Stimulus kemudian ditransmisikan ke otak melalui jaringan

syaraf. Hal yang terjadi kemudian adalah pengorganisasian dan penterjemahan melalui pengamatan dan evaluasi serta interpretasi terhadap stimulus tersebut.

Thoha (1993:56) menjelaskan bahwa "... jika informasi berasal dari suatu situasi yang telah diketahui oleh seseorang, maka informasi yang datang tersebut akan mempengaruhi cara seseorang mengorganisasikan persepsinya". Proses ini (gambar 2.2) meliputi tiga tahap. Pertama, berdasarkan adanya kesamaan dan ketidaksamaan ciri, suatu objek dapat dipersepsi sebagai objek yang berhubungan dan tidak berhubungan. Artinya objek yang mempunyai ciri yang sama dipersepsi memiliki hubungan, demikian pula sebaliknya. Kedua, dengan melihat kedekatan dalam ruang, objek atau peristiwa yang dilihat oleh seseorang akan dengan mudah diartikan sebagai objek yang ada hubungannya. Ketiga, berdasarkan kedekatan dalam waktu, objek atau peristiwa juga dapat dilihat sebagai sebuah hal yang mempunyai hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam dimensi waktu.



Sumber: Thoha, Miftah. 1993. *Perilaku Organisasi: Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Perkasa.

Gambar 2.2

Proses Organisasi Persepsi

Di lain pihak, Robbins (2003:145) menjelaskan bahwa proses pengorganisasian persepsi hanya berlangsung dalam dua tahap, yaitu organisasi dan interpretasi. Sedangkan Luthans (1998:11), seperti telah dijelaskan sebelumnya, membagi proses persepsi menjadi tiga proses, yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi.

Satu hal yang kemudian dapat dihubungkan dari teori persepsi dan topik bahasan penelitian ini adalah sebuah kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam menanggapi isu penerapan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun, dengan berusaha mengabaikan kemungkinan tersebut, seharusnya terdapat kesamaan persepsi di antara kedua belah pihak berkaitan dengan sistematika pelaporan keuangan yang digunakan. Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5) dalam Standar Akuntansi Keuangan menegaskan adanya empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang salah satunya berkaitan dengan kemudahan informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. IAI juga menjelaskan, sehubungan dengan karakteristik tersebut, "... pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar". Beranjak dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa demi terwujudnya aspek pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi yang efektif dan maksimal, antara penyusun dan pengguna laporan keuangan diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai praktek-praktek pelaporan keuangan dalam sebuah organisasi.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Isu mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba telah lama dan banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan perihal pertanggungjawaban kinerja sebuah organisasi, dalam hal ini adalah organisasi dalam bentuk nirlaba. Beberapa akedemisi telah melakukan banyak kajian mengenai isu Akuntansi ini. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Pusparini (2010) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung yang telah menguji sampai sejauh mana tingkat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 pada organisasi penyaluran dana umat tersebut dan pengaruhnya pada aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dengan menggunakan indikator Prinsip Pengakuan, Prinsip Pengukuran, Prinsip Pengungkapan, dan Prinsip Penyajian, hasil penelitian menunjukkan tingkat penerapan PSAK 45 yang terkategori baik, walaupun diperoleh fakta bahwa hanya sebagian sampel yang konsisten dalam penerapan standar tersebut. Juga, ditemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 terhadap aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Rahwati (2010). Dengan mengambil objek penelitian yaitu pelaporan keuangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur, dilakukan suatu eksplorasi mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan masih digunakannya sistem pencatatan *single entry* dan 'dasar kas' sebagai dasar pengakuan terjadinya transaksi. Serta

dari sistem pencatatan tersebut KONI Provinsi Jawa Timur belum membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang terdiri dari Laporan Arus Kas, Laporan Aktivitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Selama ini, penelitian mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba masih hanya menyentuh lingkungan manajemen organisasi sebagai pihak penyusun laporan keuangan. Padahal, sesuai konsep laporan keuangan yang merupakan alat komunikasi antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dan penyaji laporan keuangan dengan pihak lain sebagai pemakai laporan keuangan, ada satu elemen penting yang terlupakan, yaitu pihak pengguna laporan keuangan itu sendiri. Pihak pengguna laporan keuanganlah yang sebenarnya harus lebih diperhatikan berkaitan dengan kualitas penyajian sebuah laporan keuangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, selain dilakukan suatu eksplorasi terhadap tingkat kepatuhan sebuah organisasi nirlaba dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, juga akan dilakukan kajian terhadap persepsi para pengguna laporan keuangannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam hal objek penelitian yang digunakan, yaitu pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Penelitian ini juga membicarakan isu yang sama yaitu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Yang kemudian membuatnya berbeda adalah dalam hal penentuan subjek penelitian, di mana dilakukan pada

organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Perbedaan lain yang utama adalah adanya perluasan topik dengan menyorot pada aspek persepsi para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut.

2.3. Hipotesis

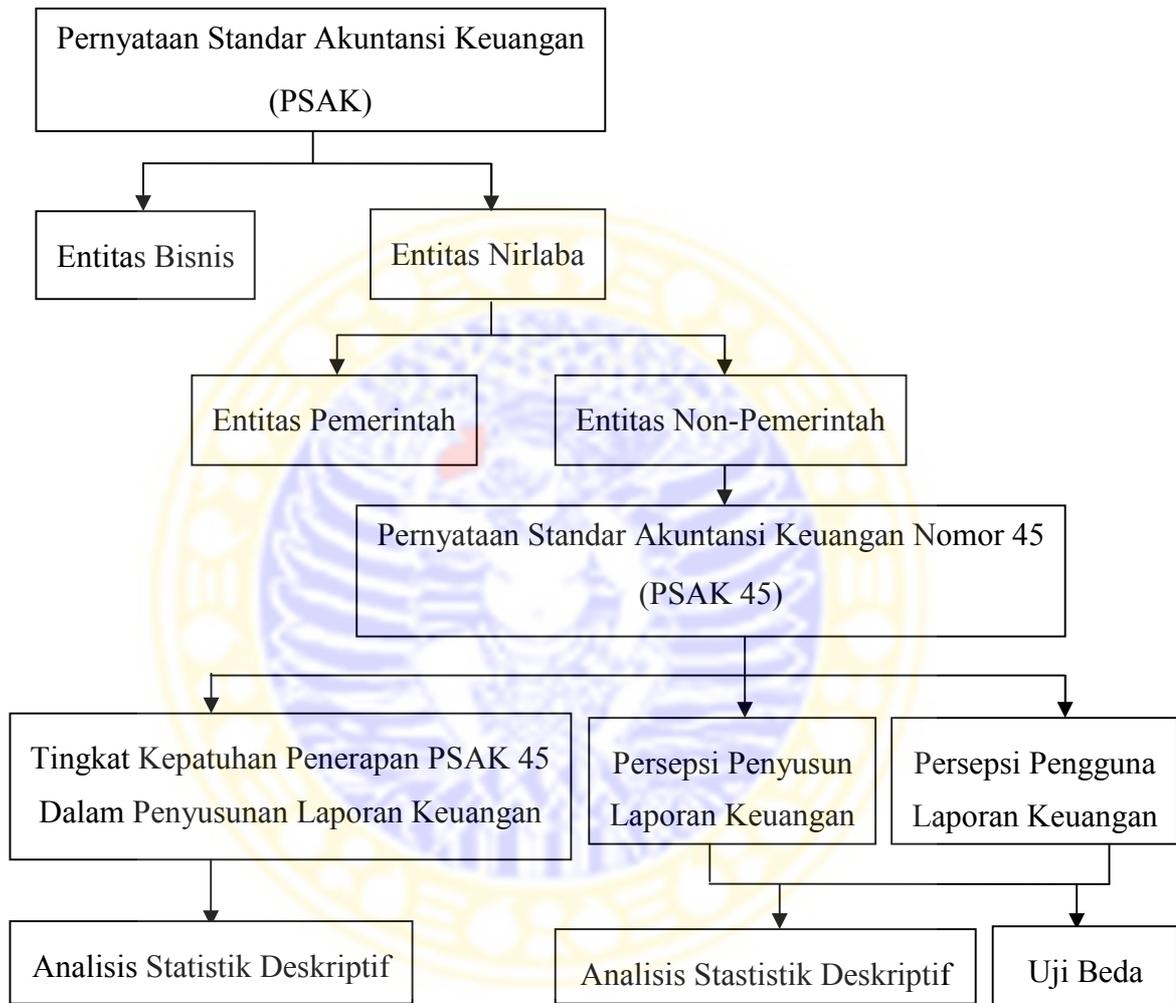
Dalam penelitian ini, akan dilakukan serangkaian kegiatan untuk menemukan jawaban atas tiga rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan. Rumusan masalah pertama dan kedua bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengeksplorasi keberadaan variabel mandiri, yaitu tingkat kepatuhan penerapan PSAK 45 dan persepsi terhadap penerapan PSAK 45. Rumusan masalah ketiga bersifat komparatif yaitu membandingkan keberadaan variabel mandiri, yaitu persepsi terhadap penerapan PSAK 45, pada dua kelompok sampel, yaitu penyusun dan pengguna laporan keuangan.

Hipotesis kemudian akan dirumuskan untuk memberikan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Untuk rumusan masalah pertama dan kedua, tidak akan dilakukan perumusan hipotesis karena nantinya jawaban yang diperoleh hanya berupa deskripsi dan pemaparan. Hipotesis akan dirumuskan untuk memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

“Penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali memiliki persepsi yang sama terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”.

2.4. Kerangka Berpikir

Alur kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3

Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan datanya adalah survey yang dilakukan dengan menyerahkan angket (kuesioner) kepada komponen penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali untuk kemudian diisi dan selanjutnya dilakukan proses analisis atas hasil yang diperoleh.

Penelitian diawali dengan mengeksplorasi tingkat kepatuhan penyusun laporan keuangan dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Indikator pengukuran yang digunakan didasarkan pada butir-butir ketentuan dalam naskah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya adalah mencari informasi mengenai persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan uji analisis dua sampel untuk menemukan ada tidaknya perbedaan yang signifikan di antara kedua kelompok

responden tersebut dalam rangka pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dalam penelitian ini.

3.2. Identifikasi Variabel

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1) tingkat kepatuhan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan (2) persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

3.3. Operasionalisasi Variabel

a. Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45

Variabel tingkat kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ukuran besarnya intensitas kesesuaian tata cara dan sistematika pelaporan keuangan yang mengacu pada standar atau spesifikasi tertentu, dalam hal ini yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

Eksplorasi akan dilakukan berkenaan dengan variabel penelitian tersebut yaitu kepatuhan sebuah organisasi nirlaba dalam menerapkan PSAK 45. Variabel tingkat kepatuhan penerapan PSAK 45 dalam penelitian ini merupakan variabel mandiri dan akan diukur dengan instrumen yang dikembangkan berdasarkan *treatment* pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian sesuai dengan definisi serta ketentuan pelaporan keuangan dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan Nomor 45. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima *point* (1-5), dengan skor '5' berkategori 'Selalu' sampai skor '1' berkategori 'Tidak Pernah' dan dianalisis berdasarkan analisis statistik deskriptif.

b. Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan Terhadap Penerapan PSAK 45

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pandangan, sikap, dan penilaian terhadap isu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

Variabel penelitian persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap penerapan PSAK 45 juga merupakan variabel mandiri. Variabel ini akan diukur dengan instrument berdasarkan indikator pengetahuan tentang PSAK 45, pandangan terhadap eksistensi dan legalitas PSAK 45, dan pendapat menyangkut penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Pengukuran masing-masing indikator dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima *point* (1-5), dengan skor '5' berkategori 'Sangat Setuju' sampai skor '1' berkategori 'Sangat Tidak Setuju' dan akan dilakukan analisis perbedaannya dengan uji beda *t-test*.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu data subjektif mengenai teknik dan konsep pelaporan keuangan yang digunakan pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah

Provinsi Bali serta data berupa komponen sikap, pemikiran, pandangan, dan pendapat berkaitan dengan penerapan PSAK 45 pada organisasi tersebut. Selain itu, digunakan juga data dalam bentuk informasi demografi responden, seperti umur, jenis kelamin, jabatan dalam organisasi, tingkat pendidikan, dan sebagainya.

Data yang diperoleh bersumber dari jawaban-jawaban responden atas butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang telah disebar. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden untuk kemudian diisi dalam jangka waktu paling lambat dua minggu sejak tanggal penerimaan. Setelah jangka waktu pengisian terpenuhi, kuesioner kemudian dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Jumlah kuesioner yang disebar berjumlah 70 buah, dengan rincian 10 kuesioner berkaitan dengan kepatuhan organisasi dalam menerapkan PSAK 45 dan 60 kuesioner berkaitan dengan persepsi penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap penerapan PSAK 45 di organisasi tersebut.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini membagi responden dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Kelompok penyusun laporan keuangan yaitu bendahara dan staf bagian keuangan pada seluruh organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan sumber yang diperoleh, dapat diketahui jumlah Palang Merah Indonesia yang terdapat di Provinsi Bali adalah 10 unit. Rinciannya adalah satu unit Palang Merah Indonesia Provinsi (berkedudukan di ibukota provinsi yaitu Kota Denpasar) dan sembilan unit Palang Merah Indonesia

Kabupaten/Kota yang tersebar di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli serta satu unit di Kota Madya Denpasar. Untuk masing-masing unit organisasi, ditentukan tiga orang sebagai responden, sehingga jumlah seluruh responden untuk kelompok penyusun laporan keuangan adalah 30 orang.

- b. Kelompok pengguna laporan keuangan yaitu 30 orang staf bagian keuangan pada dinas-dinas pemerintahan terkait di wilayah Provinsi Bali, dengan rincian 10 responden pada masing-masing dinas yang dimaksud, yaitu (1) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi Bali sebagai 'donatur' sumber daya keuangan bagi Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali sehingga memiliki kepentingan atas laporan keuangan organisasi berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang diberikan; (2) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan atas pelaporan keuangan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali dalam hal konsistensi dan kontinuitas kinerja organisasi terutama berkaitan dengan penyelenggaraan program-program di bidang kesehatan; dan (3) Dinas Sosial Provinsi Bali, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan atas pelaporan keuangan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali dalam hal konsistensi dan kontinuitas kinerja organisasi

terutama berkaitan dengan penyelenggaraan program-program di bidang kemanusiaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket/kuesioner yang disebarakan kepada subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang telah ditentukan alternatif jawaban dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Kuesioner yang digunakan meliputi:

(1) Kuesioner Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45

Kuesioner tahap pertama diberikan kepada kelompok penyusun laporan keuangan yaitu bendahara pada seluruh unit Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Masing-masing unit memperoleh satu buah kuesioner sehingga total keseluruhan kuesioner yang disebarakan berjumlah 10 buah. Variabel pertanyaan dalam kuesioner ini diambil dan dikembangkan dari penelitian serupa oleh Pusparini (2010). Kuesioner terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- i. Bagian I berupa pertanyaan tentang identitas responden (unsur *demographic items*) seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama masa kerja dan unit kerja serta jabatan dalam organisasi.
- ii. Bagian II berupa pertanyaan tentang pengalaman dan perilaku konsumen (unsur *factual items*), sehubungan dengan pengetahuan dan kemampuan responden berkaitan dengan Akuntansi serta

pengalaman dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan kedinasan mengenai teknis pelaporan keuangan.

- iii. Bagian III berupa 49 butir pertanyaan tentang praktek pencatatan atau perlakuan Akuntansi sesuai pedoman PSAK 45 dalam organisasi berkaitan dengan Prinsip Pengakuan (32 butir pertanyaan), Prinsip Pengukuran (dua butir pertanyaan), Prinsip Pengungkapan (empat butir pertanyaan), dan Prinsip Penyajian (11 butir pertanyaan). *Scoring* setiap jawaban dilakukan menggunakan tipe skala Likert dalam skala 1-5, dengan pilihan jawaban 'Selalu' bernilai '5', jawaban 'Sering' bernilai '4', jawaban 'Kadang-kadang' bernilai '3', jawaban 'Hampir Tidak Pernah' bernilai '2', dan jawaban 'Tidak Pernah' bernilai '1'.

(2) Kuesioner Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45

Kuesioner tahap kedua diberikan kepada kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan. Untuk kelompok penyusun laporan keuangan, kuesioner diberikan kepada bendahara dan staf bagian keuangan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali. Masing-masing unit memperoleh tiga buah kuesioner sehingga total keseluruhan kuesioner yang disebarkan berjumlah 30 buah. Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, kuesioner diberikan kepada staf bagian keuangan pada dinas-dinas pemerintahan Provinsi Bali, yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali (10 buah), Dinas Kesehatan Provinsi Bali (10 buah), dan Dinas Sosial Provinsi Bali (10 buah). Total keseluruhan

kuesioner yang disebarakan kepada kelompok pengguna laporan keuangan berjumlah 30 buah. Variabel pertanyaan dalam kuesioner ini diambil dan dikembangkan dari penelitian sejenis oleh Ladewi (2005). Kuesioner terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- i. Bagian I berupa pertanyaan tentang identitas responden (unsur *demographic items*) seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama masa kerja dan unit kerja serta jabatan dalam organisasi.
- ii. Bagian II berupa pertanyaan tentang pengalaman dan perilaku konsumen (unsur *factual items*), sehubungan dengan pengetahuan dan kemampuan responden berkaitan dengan Akuntansi serta pengalaman dalam mengikuti pendidikan atau pelatihan kedinasan mengenai teknis pelaporan keuangan.
- iii. Bagian III berupa 15 butir pertanyaan tentang persepsi terhadap penerapan PSAK 45 untuk indikator pengetahuan tentang PSAK 45 (lima butir pertanyaan), indikator pandangan terkait legalitas PSAK 45 (tiga butir pertanyaan), dan indikator pendapat mengenai penerapan PSAK (tujuh butir pertanyaan). *Scoring* setiap jawaban menggunakan tipe skala Likert dalam skala 1-5, dengan pilihan jawaban ‘Sangat Setuju’ bernilai ‘5’, jawaban ‘Setuju’ bernilai ‘4’, jawaban ‘Kurang Setuju’ bernilai ‘3’, jawaban ‘Tidak Setuju’ bernilai ‘2’, dan jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ bernilai ‘1’.

3.6. Teknis Analisis

a. Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum memasuki tahap analisis data, dilakukan uji validitas dan uji realibilitas terlebih dahulu pada data kuesioner yang telah disebar dan diolah. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apa yg seharusnya diukur dan menilai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan, uji realibilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dikatakan *realible* bila ketika dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama maka diperoleh hasil yang relatif sama, dengan syarat aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

1) Uji Validitas

Uji validitas berkaitan dengan pengujian kemampuan alat ukur yang sudah dibuat apakah betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian ini bertujuan agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran. Pengujian validitas dilakukan terhadap kuesioner dengan menggunakan Korelasi *Pearson's Product Moment* dengan bantuan program *SPSS for Windows* versi 11.5. Instrumen penelitian dikatakan valid jika diperoleh nilai koefisien korelasi $\geq 0,3$ (Sugiyono, 2010).

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berkaitan dengan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran relatif konsisten dari waktu ke waktu. Realibilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau

dapat diandalkan (Singarimbun, 1989). Pengujian realibilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* versi 11.5 dan hasilnya dinyatakan dalam koefisien Cronbach dengan menggunakan Alpha (α) 0,6. Instrumen penelitian dikatakan reliable jika dari hasil uji didapat nilai $\alpha > 0,6$ (Ghozali, 2005).

b. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk membuktikan apakah data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* versi 11.5. Penentuan apakah suatu data terdistribusi normal adalah melalui kriteria sebagai berikut:

- 1) bila nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih kecil dari 5%, maka data dikatakan tidak terdistribusi normal.
- 2) bila nilai signifikansi (nilai probabilitasnya) lebih besar dari 5%, maka data dikatakan terdistribusi normal.

Dari hasil penentuan sifat sebaran data yang diperoleh (terdistribusi normal/tidak), kemudian akan ditentukan teknik statistik yang digunakan selanjutnya dalam pengujian hipotesis penelitian. Apabila data terdistribusi secara normal, hipotesis penelitian akan diuji dengan menggunakan teknik pengujian *Independent T-test*. Sebaliknya, apabila uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji *Mann-Whitney Test*.

c. Analisis Statistik Deskriptif (Uji Rata-rata)

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi dan menentukan tingkat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba serta persepsi pengguna dan penyusun laporan keuangan atas penerapan standar tersebut pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Ukuran yang kemudian digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*) masing-masing butir jawaban. Nilai tendensi sentral ini dihitung dengan membagi nilai total skor variabel dari tiap responden dengan jumlah skor ideal untuk variabel tersebut. Skor ideal yang dimaksud adalah nilai maksimum yang dapat dicapai dalam pengisian kuesioner, yaitu apabila semua responden memilih pilihan jawaban dengan skor tertinggi untuk seluruh pertanyaan dalam kuesioner. Perhitungan nilai rata-rata (*mean*) tersebut adalah:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n} \dots\dots\dots (1)$$

(Indriantoro dan Supomo, 2003:173)

Keterangan:

\bar{x} = mean (rata-rata)

Σ = epsilon (jumlah)

Xi = nilai X responden ke-i, i dari 1 sampai ke-n

n = jumlah skor ideal

Hasil penghitungan rata-rata jawaban untuk masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk setiap butir jawaban dari kuesioner. Untuk penentuan kriteria, maka terlebih dahulu

ditentukan interval skor rata-rata untuk masing-masing variabel secara keseluruhan dengan mencari rentang data sebagai berikut:

$$\text{Rentang data} = \text{Data Tertinggi} - \text{Data Terendah}$$

Sedangkan penentuan panjang kelas intervalnya dirumuskan dengan:

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{\text{Rentang Data}}{\text{Panjang Kelas}}$$

Dengan menggunakan skala Likert, nilai skor tertinggi adalah skor 5 bernilai 100% dan nilai skor terendah adalah skor 1 bernilai 20%. Skoring ini menghasilkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{100\% - 20\%}{5} = 16\%$$

Dari perolehan nilai panjang kelas tersebut, ditentukan kriteria pencapaian atau tingkat kepatuhan penerapan PSAK 45 seperti ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Kepatuhan

Kriteria Variabel Kepatuhan	Interval Rata-rata Skor
Sangat Tidak Patuh	20% – 36%
Tidak Patuh	>36% – 52%
Kurang Patuh	>52% – 68%
Patuh	>68% – 84%
Sangat Patuh	>84% – 100%

Sumber: Pusparini, Nidya. 2010. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan (Survei Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)*. Skripsi diterbitkan. Bandung: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Kriteria untuk variabel persepsi terhadap penerapan PSAK 45 kemudian juga ditentukan. Kriteria yang digunakan diambil dari Karengga (2001) dengan sedikit modifikasi untuk kepentingan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan kemudian ditampilkan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Kriteria Persepsi

Kriteria Variabel Persepsi	Interval
Sangat Tidak Setuju	20% – 36%
Tidak Setuju	>36% – 52%
Kurang Setuju	>52% – 68%
Setuju	>68% – 84%
Sangat Setuju	>84% – 100%

Sumber: Karengga, Dewi Manis. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi dalam Memilih Karir Sebagai Akuntan Publik*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

d. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji *Independent t-Test* (untuk data yang terdistribusi normal) dan uji *Mann-Whitney Test* (untuk data yang tidak terdistribusi normal). Pengujian dilakukan dengan bantuan program *SPSS for Windows* versi 11.5 dengan mencari nilai signifikansi data yang diuji untuk kemudian membuktikan nilai dari hipotesis yang diajukan, apakah diterima atau ditolak. Dengan rumusan hipotesis:

H_0 : Penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Iindonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali memiliki persepsi yang sama terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45

H_1 : Terdapat perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45

H_0 : μ penyusun = μ pengguna

H_1 : μ penyusun \neq μ pengguna

α : 0,05

maka, hipotesis penelitian (H_0) diterima jika diperoleh nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Sebaliknya, hipotesis penelitian (H_0) ditolak jika diperoleh nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban atas beberapa permasalahan yang diajukan, yaitu untuk (1) mengeksplorasi tingkat kepatuhan organisasi nirlaba dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45); (2) mencari informasi mengenai persepsi penyusun laporan keuangan organisasi nirlaba atas penerapan PSAK 45; (3) mencari informasi mengenai persepsi pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba atas penerapan PSAK 45; dan (4) menyelidiki perbedaan persepsi yang dimiliki oleh penyusun dan pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba atas penerapan PSAK 45 tersebut. Penelitian kemudian membagi subyek penelitian ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok penyusun laporan keuangan dan kelompok pengguna laporan keuangan.

Kelompok penyusun laporan keuangan merupakan responden yang berasal dari organisasi Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri, yang didirikan pada tanggal 17 September 1945 dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Organisasi ini berperan dalam membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama

tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-undang Nomor 59 (www.pmi.or.id).

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional XIX tahun 2009, tugas pokok Palang Merah Indonesia adalah (1) kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana; (2) pemberian pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan; (3) mengadakan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan (4) penyediaan layanan transfusi darah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1980. Dalam melaksanakan tugasnya, PMI senantiasa berlandaskan pada tujuh prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu Kemanusiaan, Kesukarelaan, Kenetralan, Kesamaan, Kemandirian, Kesatuan dan Kesemestaan.

Sebagai sebuah bagian dari kegiatan kepalangmerahan dunia, Palang Merah Indonesia telah mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963. Kini jaringan kerja Palang Merah Indonesia telah tersebar di 31 daerah tingkat I/provinsi dan sekitar 300 markas Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di daerah tingkat II (<http://bataviase.co.id>). Istilah ‘markas’ PMI memiliki pengertian “... perangkat dan sarana organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas kepalangmerahan” (Palang Merah Indonesia, 2009). Selain itu, dalam rangka pemenuhan tugas dan

kewajiban dalam pelayanan bidang transfusi darah, Palang Merah Indonesia juga mendapat dukungan operasional dari 190 Unit Transfusi Darah yang tersebar pada 221 kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia (<http://health.kompas.com>). Unit transfusi darah merupakan unit organisasi yang dibentuk sebagai sebuah upaya kesehatan transfusi darah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980. Palang Merah Indonesia menjadi salah satu organisasi resmi yang mendapat kewenangan pengolahan dan pelaksanaan usaha transfusi darah di Indonesia selain instansi-instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Palang Merah Indonesia Provinsi Bali dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota yang menjadi subyek penelitian merupakan struktur organisasi Palang Merah Indonesia yang meliputi wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali. Palang Merah Indonesia Provinsi Bali (dulu bernama Palang Merah Indonesia Daerah Bali) sebagai sebuah organisasi sosial kemanusiaan mulai menampakkan segala aktifitasnya sejak 18 Februari 1963 saat terjadi letusan Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Bencana alam ini telah memakan korban hingga 1500 jiwa. Palang Merah Indonesia yang pada saat itu baru terbentuk di masing-masing kabupaten/kota di Bali tidak dapat menangani kejadian tersebut sehingga markas besar Palang Merah Indonesia di Jakarta mengirimkan enam kali tim medis dan sosial ke Bali sekaligus mengkoordinasikan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota (dulu bernama Palang Merah Indonesia Cabang) yang ada. Atas kejadian tersebut maka semua Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota yang sebelumnya ada di Bali berkoordinasi dan pada Kongres Nasional VII PMI dibentuklah Palang

Merah Indonesia Provinsi Bali tepat tanggal 16 Desember 1963 (www.pmibali.or.id).

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Pada masing-masing unit organisasi, diserahkan satu buah kuesioner 'Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45' dan satu buah kuesioner 'Persepsi Penerapan PSAK 45' kepada satu orang responden penyusun laporan keuangan pada markas Palang Merah Indonesia. Kuesioner 'Persepsi Penerapan PSAK 45' juga diserahkan kepada dua orang responden penyusun laporan keuangan pada bagian Unit Transfusi Darah. Secara keseluruhan terdapat 10 unit organisasi Palang Merah Indonesia yang menjadi subyek dalam penelitian ini, yaitu:

a. Palang Merah Indonesia Provinsi Bali

Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar, ibukota Provinsi Bali, tepatnya di Jalan Imam Bonjol KM. 3 Nomor 182 Denpasar sedangkan Unit Transfusi Darah Pembina Palang Merah Indonesia Provinsi Bali berlokasi di RSUP Sanglah, Jalan Kesehatan Denpasar.

b. Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng berkedudukan di Jalan Yudhistira Nomor 10 Singaraja sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng berlokasi di RSUD Buleleng, Jalan Ngurah Rai Singaraja-Bali.

c. Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem berkedudukan di

Jalan Ngurah Rai No. 55 Amlapura sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem berlokasi di RSUD Karangasem, Jalan Ngurah Rai Amlapura-Bali

d. Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Semarapura sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung berlokasi di RSUD Klungkung, Jalan Flamboyan Klungkung-Bali

e. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Bangli sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli berlokasi di RSUD Bangli, Jalan Kusumayudha Bangli-Bali.

f. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana berkedudukan di Komplek Civic Centre Pecangakan Negara sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Negara berlokasi di RSUD Negara, Jalan Wijaya Kusuma Jembrana-Bali

g. Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan berkedudukan di Jalan Rama Nomor 3A Tabanan sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan berlokasi di RSUD Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 14 Tabanan-Bali

h. Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar berkedudukan di Jalan Manik Nomor 10 Gianyar Ngurah Rai No. 55 Amlapura sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar berlokasi di RSUD Gianyar, Jalan Ciung Wanara Gianyar-Bali.

i. Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung

Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung berkedudukan di Jalan Imam Bonjol KM. 3 Nomor 182 Denpasar sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung berlokasi di RSUD Kapal, Jalan Raya Kapal Badung-Bali.

j. Palang Merah Indonesia Kota Denpasar

Markas Palang Merah Indonesia Kota Denpasar berkedudukan di Jalan Imam Bonjol KM. 3 Nomor 182 Denpasar sedangkan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Denpasar berlokasi di RSUD Wangaya, Jalan Kartini Denpasar-Bali.

Jumlah total responden yang menjadi subyek penelitian untuk kelompok penyusun laporan keuangan pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali adalah 30 orang, dengan rincian satu orang pada Markas Palang Merah Indonesia dan dua orang pada Unit Transfusi Darah untuk masing-masing unit organisasi di seluruh Bali. Data demografi responden kelompok tersebut berdasarkan beberapa kriteria kemudian ditampilkan dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3, Tabel 4.4, dan Tabel 4.5.

Tabel 4.1
Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	17	56,67
Perempuan	13	43,33
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.1 menampilkan data responden kelompok penyusun laporan keuangan menurut karakteristik jenis kelamin. Diperoleh informasi bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17 orang (56,67%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (43,33%). Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok penyusun laporan keuangan yang menjadi subyek penelitian didominasi responden berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.2
Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SMA/Sederajat	12	40,00
D3	6	20,00
S1	8	26,67
S2	4	13,33
S3	0	0,00
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.2 menampilkan data responden kelompok penyusun laporan keuangan menurut jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Diperoleh informasi bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 12 orang (40%), Diploma III sebanyak enam orang (20%), Strata I sebanyak delapan orang (26,67%), dan Strata II sebanyak empat orang (13,33%).

Tabel 4.3
Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun
Berdasarkan Lama Masa Kerja

Lama Masa Kerja (tahun)	Jumlah	Prosentase
< 1	2	6,67
1 – 5	13	43,33
> 5	15	50,00
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.3 menampilkan data responden kelompok penyusun laporan keuangan berdasarkan jangka waktu pengabdian kerja dalam organisasi. Diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (50,00%) telah menduduki jabatan selama lebih dari lima tahun. Sisanya, sebanyak 13 responden (43,33%) bekerja antara satu hingga lima tahun dan dua orang responden (6,67%) kurang dari satu tahun.

Tabel 4.4
Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun
Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pelatihan Kedinasan tentang Keuangan

Keikutsertaan	Jumlah	Prosentase
Pernah	10	33,33
Tidak Pernah	20	66,67
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.4 menampilkan data responden kelompok penyusun laporan keuangan berdasarkan pengalaman yang dimiliki sehubungan dengan keikutsertaan dalam pelatihan kedinasan di bidang keuangan. Terlihat bahwa lebih dari setengah jumlah responden (66,67%) tidak pernah mengikuti pelatihan kedinasan yang dimaksud.

Tabel 4.5
Klasifikasi Responden Kelompok Penyusun
Berdasarkan Pengetahuan Berbasis Akuntansi yang Dimiliki

Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
Memiliki	13	43,33
Tidak Memiliki	17	56,67
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.5 menampilkan data responden kelompok penyusun laporan keuangan berdasarkan pengetahuan berbasis Akuntansi yang dimiliki. Terlihat bahwa lebih dari setengah jumlah responden (56,67%) tidak memiliki pengetahuan berbasis Akuntansi yang dimaksud.

Kelompok responden kedua, yaitu pengguna laporan keuangan adalah responden yang diambil dari tiga instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan kerja dengan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Instansi-instansi yang dimaksud adalah:

- a. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, yaitu unsur staf Pemerintah Provinsi Bali yang berperan dalam merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam lingkungan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas serta mengkoordinasikan tugas-tugas bidang kesejahteraan rakyat kepada instansi terkait. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali merupakan ‘donatur’ sumber daya keuangan bagi Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali sehingga memiliki kepentingan atas laporan keuangan organisasi berkaitan dengan pengelolaan sumber dana yang diberikan

- b. Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menjamin tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan perkembangan pembangunan kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali telah banyak mengadakan kerja sama dalam berbagai kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, seperti Program 'Tanggap Flu Burung', Unit Transfusi Darah, dan lainnya. Instansi ini memiliki kepentingan atas pelaporan keuangan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali dalam hal konsistensi dan kontinuitas kinerja organisasi terutama berkaitan dengan penyelenggaraan program-program di bidang kesehatan
- c. Dinas Sosial Provinsi Bali, yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan fungsi penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Bali adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial dibidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial. Dinas Sosial Provinsi Bali bersama dengan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali telah berperan aktif dalam beberapa kegiatan kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan bagi korban bencana alam gunung meletus, banjir, tanah longsor dan sebagainya yang terjadi di wilayah Provinsi Bali. Instansi ini memiliki kepentingan atas pelaporan keuangan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali dalam hal konsistensi dan kontinuitas kinerja organisasi

terutama berkaitan dengan penyelenggaraan program-program di bidang kemanusiaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jumlah total responden yang menjadi subyek penelitian untuk kelompok pengguna laporan keuangan pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali adalah 30 orang, dengan rincian 10 orang responden pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, 10 responden pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan 10 responden pada Dinas Sosial Provinsi Bali. Data demografi responden kelompok tersebut berdasarkan beberapa kriteria kemudian ditampilkan dalam Tabel 4.6, Tabel 4.7, Tabel 4.8, Tabel 4.9, dan Tabel 4.10.

Tabel 4.6
Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	14	46,67
Perempuan	16	53,33
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.6 menampilkan data responden kelompok pengguna laporan keuangan menurut karakteristik jenis kelamin. Diperoleh informasi bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 14 orang (46,67%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang (53,33%). Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok penyusun laporan keuangan yang menjadi subyek penelitian didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.7
Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SMA/Sederajat	6	20,00
D3	1	3,33
S1	22	73,33
S2	1	3,33
S3	0	0,00
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.7 menampilkan data responden kelompok pengguna laporan keuangan menurut jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh. Diperoleh informasi bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak enam orang (20%), Diploma III sebanyak satu orang (3,33%), Strata I sebanyak 22 orang (73,33%), dan Strata II sebanyak satu orang (3,33%).

Tabel 4.8
Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna
Berdasarkan Lama Masa Kerja

Lama Masa Kerja (tahun)	Jumlah	Prosentase
< 1	4	13,33
1 – 5	10	33,33
> 5	16	53,33
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.8 menampilkan data responden kelompok pengguna laporan keuangan berdasarkan jangka waktu pengabdian kerja dalam organisasi. Diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (53,33%) telah menduduki jabatan selama lebih dari lima tahun. Sisanya, sebanyak 10 responden (33,33%)

bekerja antara satu hingga lima tahun dan empat orang responden (13,337%) kurang dari satu tahun.

Tabel 4.9
Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna
Berdasarkan Keikutsertaan dalam Pelatihan Kedinasan tentang Keuangan

Keikutsertaan	Jumlah	Prosentase
Pernah	6	20,00
Tidak Pernah	24	80,00
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.9 menampilkan data responden kelompok pengguna laporan keuangan berdasarkan pengalaman yang dimiliki sehubungan dengan keikutsertaan dalam pelatihan kedinasan di bidang keuangan. Terlihat bahwa lebih dari setengah jumlah responden (80,00%) tidak pernah mengikuti pelatihan kedinasan yang dimaksud.

Tabel 4.10
Klasifikasi Responden Kelompok Pengguna
Berdasarkan Pengetahuan Berbasis Akuntansi yang Dimiliki

Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
Memiliki	20	66,67
Tidak Memiliki	10	33,33
Total	30	100

Sumber : data primer diolah

Tabel 4.10 menampilkan data responden kelompok pengguna laporan keuangan berdasarkan pengetahuan berbasis Akuntansi yang dimiliki. Terlihat bahwa lebih dari setengah jumlah responden (66,67%) telah memiliki pengetahuan berbasis Akuntansi yang dimaksud.

4.2. Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen penelitian (kuesioner) dalam penelitian ini meliputi:

a. Uji Validitas

Hasil perhitungan validitas untuk masing-masing indikator penelitian ditampilkan pada Tabel 4.11 sampai dengan Tabel 4.19.

Tabel 4.11

Uji Validitas (Tahap I) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengakuan

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan	No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 1	-0,1706	Tidak Valid	17	Nomor 17	0,3557	Valid
2	Nomor 2	0,6057	Valid	18	Nomor 18	0,5263	Valid
3	Nomor 3	0,5245	Valid	19	Nomor 19	0,7096	Valid
4	Nomor 4	0,5181	Valid	20	Nomor 20	0,3957	Valid
5	Nomor 5	0,2343	Tidak Valid	21	Nomor 21	0,5444	Valid
6	Nomor 6	0,3839	Valid	22	Nomor 22	0,3096	Valid
7	Nomor 7	0,7176	Valid	23	Nomor 23	0,5944	Valid
8	Nomor 8	0,9257	Valid	24	Nomor 24	0,0411	Tidak Valid
9	Nomor 9	0,2580	Tidak Valid	25	Nomor 25	0,4115	Valid
10	Nomor 10	0,6311	Valid	26	Nomor 26	0,7820	Valid
11	Nomor 11	0,1905	Tidak Valid	27	Nomor 27	0,7089	Valid
12	Nomor 12	0,1027	Tidak Valid	28	Nomor 28	-0,0887	Tidak Valid
13	Nomor 13	0,0163	Tidak Valid	29	Nomor 29	0,0000	Tidak Valid
14	Nomor 14	0,6211	Valid	30	Nomor 30	0,0000	Tidak Valid
15	Nomor 15	0,7745	Valid	31	Nomor 31	0,0000	Tidak Valid
16	Nomor 16	0,5610	Valid	32	Nomor 32	0,0000	Tidak Valid

Sumber : lampiran 7 diolah

Tabel 4.12

Uji Validitas (Tahap II) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Indikator Prinsip Pengakuan

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan	No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 2	0,6034	Valid	11	Nomor 17	0,3670	Valid
2	Nomor 3	0,5995	Valid	12	Nomor 18	0,4916	Valid
3	Nomor 4	0,5720	Valid	13	Nomor 19	0,7201	Valid
4	Nomor 6	0,4021	Valid	14	Nomor 20	0,4121	Valid
5	Nomor 7	0,6744	Valid	15	Nomor 21	0,5806	Valid
6	Nomor 8	0,8973	Valid	16	Nomor 22	0,2435	Tidak Valid
7	Nomor 10	0,6552	Valid	17	Nomor 23	0,6145	Valid
8	Nomor 14	0,6223	Valid	18	Nomor 25	0,4190	Valid
9	Nomor 15	0,7450	Valid	19	Nomor 26	0,7465	Valid
10	Nomor 16	0,5655	Valid	20	Nomor 27	0,6640	Valid

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui bahwa dari 32 item pertanyaan yang tercantum pada kuesioner 'Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45' untuk

indikator ‘Prinsip Pengakuan’, hanya 20 item yang dinyatakan valid. Selanjutnya, kedua puluh item tersebut diuji kembali dan hasil pengujian ditampilkan pada tabel 4.12. .

Tabel 4.13

**Uji Validitas (Tahap III) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45
Indikator Prinsip Pengakuan**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan	No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 2	0,5985	Valid	11	Nomor 17	0,3348	Valid
2	Nomor 3	0,5983	Valid	12	Nomor 18	0,5209	Valid
3	Nomor 4	0,5664	Valid	13	Nomor 19	0,7462	Valid
4	Nomor 6	0,4202	Valid	14	Nomor 20	0,3919	Valid
5	Nomor 7	0,6619	Valid	15	Nomor 21	0,5488	Valid
6	Nomor 8	0,8854	Valid	16	Nomor 23	0,6518	Valid
7	Nomor 10	0,6894	Valid	17	Nomor 25	0,4256	Valid
8	Nomor 14	0,6252	Valid	18	Nomor 26	0,7365	Valid
9	Nomor 15	0,7427	Valid	19	Nomor 27	0,6509	Valid
10	Nomor 16	0,5536	Valid				

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa dari 20 item pertanyaan untuk indikator ‘Prinsip Pengakuan’ yang telah melalui uji validitas pada tahap I, ditemukan terdapat satu item yang dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, item-item lain yang dinyatakan valid diuji kembali dan hasil pengujian ditampilkan pada tabel 4.13 sehingga dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang valid dan layak digunakan dalam analisis data selanjutnya berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’ berjumlah 19 butir.

Tabel 4.14

**Uji Validitas Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45
Indikator Prinsip Pengukuran**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 33	0.0000	Tidak Valid
2	Nomor 34	0.0000	Tidak Valid

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa dari dua item pertanyaan untuk indikator Prinsip Pengukuran, tidak ada satupun item yang dinyatakan valid.

Tabel 4.15

**Uji Validitas Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45
Indikator Prinsip Pengungkapan**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 35	0,7861	Valid
2	Nomor 36	0,8338	Valid
3	Nomor 37	0,8015	Valid
4	Nomor 38	0,3558	Valid

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa dari empat item pertanyaan untuk indikator ‘Prinsip Pengungkapan’, semua item dinyatakan valid 100%.

Tabel 4.16

**Uji Validitas (Tahap I) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45
Indikator Prinsip Penyajian**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan	No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 39	0,0000	Tidak Valid	7	Nomor 45	0,7409	Valid
2	Nomor 40	0,0000	Tidak Valid	8	Nomor 46	0,6839	Valid
3	Nomor 41	0,0000	Tidak Valid	9	Nomor 47	0,5575	Valid
4	Nomor 42	0,0000	Tidak Valid	10	Nomor 48	0,5220	Valid
5	Nomor 43	0,5108	Valid	11	Nomor 49	0,5020	Valid
6	Nomor 44	0,8325	Valid				

Sumber : lampiran 7 diolah

Tabel 4.17

**Uji Validitas (Tahap II) Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45
Indikator Prinsip Penyajian**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 43	0,5108	Valid
2	Nomor 44	0,8325	Valid
3	Nomor 45	0,7409	Valid
4	Nomor 46	0,6839	Valid
5	Nomor 47	0,5575	Valid
6	Nomor 48	0,5220	Valid
7	Nomor 49	0,5020	Valid

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.16, diketahui bahwa dari 11 item pertanyaan untuk indikator 'Prinsip Penyajian', hanya tujuh item yang dinyatakan valid. Selanjutnya, ketujuh item tersebut diuji kembali dan hasil pengujian ditampilkan pada tabel 4.17 dan dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Tabel 4.18

**Uji Validitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45
Kelompok Penyusun Laporan Keuangan**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan	No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 1	0,7289	Valid	9	Nomor 9	0,7239	Valid
2	Nomor 2	0,6462	Valid	10	Nomor 10	0,7269	Valid
3	Nomor 3	0,8617	Valid	11	Nomor 11	0,8528	Valid
4	Nomor 4	0,9175	Valid	12	Nomor 12	0,8300	Valid
5	Nomor 5	0,8572	Valid	13	Nomor 13	0,7880	Valid
6	Nomor 6	0,4511	Valid	14	Nomor 14	0,7143	Valid
7	Nomor 7	0,5442	Valid	15	Nomor 15	0,6869	Valid
8	Nomor 8	0,7510	Valid				

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui bahwa dari 15 item pertanyaan yang diberikan kepada kelompok penyusun laporan keuangan berkaitan dengan variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45', semua item dinyatakan valid 100%.

Tabel 4.19

**Uji Validitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45
Kelompok Pengguna Laporan Keuangan**

No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan	No.	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Nomor 1	0,3537	Valid	9	Nomor 9	0,5371	Valid
2	Nomor 2	0,6975	Valid	10	Nomor 10	0,6161	Valid
3	Nomor 3	0,7027	Valid	11	Nomor 11	0,7110	Valid
4	Nomor 4	0,4652	Valid	12	Nomor 12	0,6023	Valid
5	Nomor 5	0,3341	Valid	13	Nomor 13	0,6978	Valid
6	Nomor 6	0,6158	Valid	14	Nomor 14	0,4581	Valid
7	Nomor 7	0,4629	Valid	15	Nomor 15	0,6609	Valid
8	Nomor 8	0,3641	Valid				

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.19 diketahui bahwa dari 15 item pertanyaan yang diberikan kepada kelompok pengguna laporan keuangan berkaitan dengan variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45', semua item dinyatakan valid 100%.

b. Uji Realibilitas

Dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* versi 11.5, diperoleh nilai realibilitas untuk setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 4.20

Uji Reliabilitas

No.	Pernyataan	Cronbach's Alpha
1	Variabel Kepatuhan Penerapan PSAK 45	
	Indikator Prinsip Pengakuan	0,9130
	Indikator Prinsip Pengungkapan	0,8323
	Indikator Prinsip Penyajian	0,8490
2	Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45	
a	Kelompok Penyusun Laporan Keuangan	
	Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	0,9217
	Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45	0,7471
	Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI	0,9214
b	Kelompok Pengguna Laporan Keuangan	
	Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45	0,7375
	Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45	0,6395
	Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI	0,8379

Sumber : lampiran 7 diolah

Berdasarkan Tabel 4.20, diketahui bahwa nilai realibilitas untuk seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator terkait variabel 'Kepatuhan Penerapan PSAK' dan variabel 'Persepsi Terhadap Penerapan PSAK' pada kedua kelompok responden adalah *reliable*.

4.3. Analisis Statistik Deskriptif

a. Kepatuhan Penerapan PSAK 45

Tabel 4.21 sampai dengan Tabel 4.30 berikut menampilkan rekapitulasi jawaban responden atas tiga indikator terkait variabel penelitian Kepatuhan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Indikator yang dimaksud adalah ‘Prinsip Pengakuan’, ‘Prinsip Pengungkapan’, dan ‘Prinsip Penyajian’ dalam sebuah laporan keuangan. Masing-masing tabel menyajikan jawaban untuk setiap subyek penelitian pada kelompok responden pertama, yaitu para penyusun laporan keuangan Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali.

Pertanyaan yang diajukan pada indikator pertama, yaitu ‘Prinsip Pengakuan’, bertujuan untuk mencari informasi mengenai praktek yang terjadi dalam organisasi berkaitan dengan frekuensi pencatatan sejumlah akun yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan. Untuk indikator kedua yaitu ‘Prinsip Pengungkapan’, responden diminta memberikan keterangan berkaitan dengan konsistensi pengungkapan informasi-informasi tambahan dalam penyusunan laporan keuangan oleh organisasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Terakhir, sehubungan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk mencari informasi mengenai sistematika penyajian beberapa unsur laporan keuangan yang dilakukan oleh organisasi.

Tabel 4.21

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Provinsi Bali
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Indikator I	0	0,00	3	15,79	5	26,32	0	0,00	11	57,89	19	100,00
2 Indikator II	0	0,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	4	100,00
3 Indikator III	1	14,28	1	14,28	2	28,58	0	0,00	3	42,86	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.21, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Bali tidak pernah melakukan pencatatan atas sebagian besar akun yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan (sekitar 57,89% dari 19 akun yang diberikan). Namun, untuk beberapa akun seperti ‘persediaan’, ‘pendapatan dari kegiatan operasional’ dan ‘kerugian non-operasional’ telah dicatat dengan baik oleh organisasi.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi tidak pernah melakukan pengungkapan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban yang dimiliki. Informasi yang telah diungkapkan dengan baik oleh organisasi adalah berkaitan dengan kebijakan Akuntansi yang digunakan, rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan, serta pengungkapan informasi lain yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, diketahui bahwa organisasi tidak pernah menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. Selain itu, organisasi juga tidak pernah menyajikan beban dan kerugian sebagai pengurang aktiva bersih tidak

terikat dalam laporan keuangannya. Organisasi hanya konsisten dalam menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Tabel 4.22

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Indikator I	2	10,53	1	5,26	5	26,32	1	5,26	10	52,63	19	100,00
2 Indikator II	1	25,00	0	0,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
3 Indikator III	2	28,58	1	14,28	1	14,28	3	42,86	0	0,00	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.22, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng telah melakukan pencatatan yang sangat baik atas dua buah akun transaksi keuangan (10,53%) yaitu ‘pendapatan dari kegiatan operasional’ dan ‘kas dari aktivitas operasi’. Sayangnya, sejumlah 10 buah akun (52,63%), contohnya ‘kas dari piutang’ dan ‘persediaan’ masih belum diungkapkan dalam laporan keuangan organisasi.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi tidak konsisten dalam mengungkapkan informasi mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan, dan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, diketahui bahwa organisasi telah dengan baik menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relatif homogen serta menyajikan beban dan kerugian

sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sayangnya, terjadi inkonsistensi organisasi dalam menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Tabel 4.23

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Indikator I	0	0,00	3	15,79	2	10,53	0	0,00	14	73,68	19	100,00
2 Indikator II	0	0,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	3	75,00	4	100,00
3 Indikator III	0	0,00	0	0,00	3	42,86	0	0,00	4	57,14	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.23, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli tampak tidak konsisten dalam melakukan pencatatan atas dua akun transaksi keuangannya (10,53%) yaitu ‘kas dari pendapatan kegiatan’ dan ‘kas dari sumber pendapatan lain-lain’. Namun, untuk tiga akun yang lain (15,79%), yaitu ‘kerugian non-operasional’, ‘kas dari sumbangan’, dan ‘kas yang dibayarkan kepada karyawan dan *supplier*’ telah dicatat dengan baik oleh organisasi.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi tidak pernah melakukan pengungkapan informasi mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan, dan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, diketahui bahwa organisasi tidak pernah menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan

pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relatif homogen serta jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar kendali organisasi dan manajemen secara netto. Organisasi juga tidak pernah mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Tabel 4.24

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Selalu		Sering		Pilihan Jawaban				Tidak Pernah		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1 Indikator I	1	5,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	94,74	19	100,00
2 Indikator II	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	75,00	4	100,00
3 Indikator III	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.24, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan tidak pernah melakukan pencatatan atas sebagian besar akun yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan (sekitar 94,74% dari 19 akun yang diberikan). Satu-satunya akun yang secara konsisten dicatat dengan baik oleh organisasi adalah akun ‘pendapatan dari sumbangan’.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik melakukan pengungkapan terkait informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Namun, organisasi tidak pernah mengungkapkan informasi mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak

tercantum pada bagian utama laporan keuangan, dan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator 'Prinsip Penyajian', diketahui bahwa organisasi tidak pernah melakukan penyajian yang baik untuk beberapa hal, seperti menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo, menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, serta mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan Tabel 4.25, berkaitan dengan indikator 'Prinsip Pengakuan', diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung telah melakukan

Tabel 4.25

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Indikator I	1	5,26	0	0,00	7	36,85	0	0,00	11	57,89	19	100,00
2 Indikator II	1	25,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	2	50,00	4	100,00
3 Indikator III	3	42,86	4	57,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

pencatatan yang sangat baik berkaitan dengan akun 'persediaan'. Walaupun demikian, ditemukan adanya inkonsistensi berkaitan dengan pencatatan beberapa akun (36,85%), seperti 'pendapatan dari kegiatan operasional', 'kas dari sumbangan' dan 'kas yang dibayarkan kepada karyawan dan *supplier*'.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi tidak konsisten dalam memberikan informasi tambahan mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, organisasi tidak

pernah melakukan pengungkapan informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan serta likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban yang dimiliki. Informasi yang telah diungkapkan dengan baik oleh organisasi adalah berkaitan dengan pengungkapan informasi lain yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator 'Prinsip Penyajian', diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo, menyajikan beban dan kerugian sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat dalam laporan keuangannya, serta secara konsisten menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Tabel 4.26

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No.	Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
		Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1	Indikator I	3	15,79	0	0,00	4	21,05	0	0,00	12	63,16	19	100,00
2	Indikator II	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
3	Indikator III	1	14,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	85,72	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.26, berkaitan dengan indikator 'Prinsip Pengakuan', diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem tidak pernah melakukan pencatatan atas sebagian besar akun yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan (sekitar 63,16% dari 19 akun yang diberikan), seperti 'piutang pasien', 'tanah, bangunan, dan peralatan', 'keuntungan operasional', 'kas dari aktivitas operasi', dan 'kas dari pendapatan kegiatan'. Di lain pihak, organisasi telah melakukan pencatatan dengan baik atas akun 'kerugian non-

operasional', 'kas dari piutang', dan 'kas yang dibayarkan kepada karyawan dan *supplier*'.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik melakukan pengungkapan terkait informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, informasi mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan. Sayangnya, organisasi tidak konsisten dalam menyajikan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator 'Prinsip Penyajian', diketahui bahwa organisasi tidak pernah melakukan penyajian yang baik untuk beberapa hal, seperti menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo, menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa, serta mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi hanya konsisten dalam menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Berdasarkan Tabel 4.27, berkaitan dengan indikator 'Prinsip Pengakuan', diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar telah melakukan pencatatan yang baik atas beberapa akun yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan, seperti 'persediaan', 'hutang jangka pendek', 'penghasilan dari

kegiatan operasi', 'kas dari sumbangan', kas dari piutang', dan 'kas dari sumber pendapatan lain-lain'. Namun, ada dua akun (10,53%) yang tidak pernah dicatat oleh organisasi, yaitu 'hutang jangka panjang' dan 'kas dari pendapatan kegiatan'.

Tabel 4.27

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1 Indikator I	3	15,79	3	15,79	9	47,36	2	10,53	2	10,53	19	100,00
2 Indikator II	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
3 Indikator III	4	57,14	0	0,00	2	28,58	0	0,00	1	14,28	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik melakukan pengungkapan terkait informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, informasi mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan, serta informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator 'Prinsip Penyajian', diketahui bahwa organisasi tidak konsisten dalam menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo serta mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di lain pihak, organisasi selalu menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki

karakteristik serupa dan relatif homogen, menyajikan pendapatan, sumbangan dan kerugian sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat menyajikan beban dan kerugian sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat serta menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Tabel 4.28

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Indikator I	2	10,53	3	15,79	1	5,26	0	0,00	13	68,42	19	100,00
2 Indikator II	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	75,00	4	100,00
3 Indikator III	1	14,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	85,72	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.28, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana tidak pernah melakukan pencatatan atas sebagian besar akun (68,42%) yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan, seperti ‘tanah, bangunan dan peralatan’, ‘persediaan’, ‘piutang pasien’, ‘keuntungan operasional’, dan ‘kerugian non-operasional’. Namun, organisasi telah mencatat dengan baik akun-akun seperti ‘pendapatan atau penghasilan dari kegiatan operasional’, ‘kas dari sumbangan’, ‘kas dari sumber pendapatan lain-lain’, serta ‘kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier’.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik melakukan pengungkapan terkait informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Sayangnya, organisasi tidak pernah mengungkapkan informasi tambahan mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan, informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan, dan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, diketahui bahwa organisasi tidak pernah menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo, mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang, menyajikan pendapatan, sumbangan dan kerugian sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, menyajikan beban dan kerugian sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat serta menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Organisasi hanya konsisten dalam menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relatif homogen.

Tabel 4.29

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kota Denpasar
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No. Item Pertanyaan	Selalu		Sering		Pilihan Jawaban				Tidak Pernah		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1 Indikator I	12	63,16	0	0,00	3	15,79	4	21,05	0	0,00	19	100,00
2 Indikator II	2	50,00	0	0,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
3 Indikator III	1	14,28	2	28,58	1	14,28	1	14,28	2	28,58	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Berdasarkan Tabel 4.29, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kota Denpasar selalu melakukan pencatatan atas beberapa akun (63,16%) yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan, seperti ‘aktiva bersih tidak terikat’, ‘pendapatan atau

penghasilan dari kegiatan operasional’, ‘keuntungan operasional’, ‘keuntungan non-operasional’, ‘kerugian operasional’, ‘kerugian non-operasional’, ‘kas dari aktivitas operasi’, ‘kas dari pendapatan kegiatan’, dan ‘kas dari sumbangan’. Namun, organisasi tidak konsisten dalam mencatat ‘kas dari piutang’, ‘hutang lain-lain yang dilunasi’, dan ‘penerimaan kas dari penjualan aktiva non-persediaan’.

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik melakukan pengungkapan terkait informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan dan informasi penting lain yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Inkonsistensi organisasi terjadi dalam pengungkapan informasi tambahan mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, diketahui bahwa organisasi tidak pernah mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang dan menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Organisasi selalu menyajikan pendapatan, sumbangan dan kerugian sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat dan menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.

Berdasarkan Tabel 4.30, berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Pengakuan’, diketahui bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung selalu melakukan

pencatatan atas beberapa akun (42,11%) yang merupakan unsur-unsur sebuah laporan keuangan, seperti 'piutang pasien', 'aktiva bersih tidak terikat', 'pendapatan atau penghasilan dari kegiatan operasional', 'kas dari sumbangan', 'kas dari piutang', 'kas dari pendapatan bunga', 'kas dari sumber pendapatan lain-lain', 'bunga yang dibayarkan', dan 'kas yang dibayarkan kepada karyawan dan *supplier*. Namun, organisasi tidak pernah mencatat 'hutang jangka pendek', 'hutang jangka panjang', 'keuntungan operasional', 'keuntungan non-operasional', 'kerugian operasional', dan 'penerimaan kas dari penjualan aktiva non-persediaan'.

Tabel 4.30

**Jawaban Responden Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung
Kuesioner Kepatuhan Penerapan PSAK 45**

No.	Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
		Selalu		Sering		Kadang-kadang		Hampir Tidak Pernah		Tidak Pernah		Σ	%
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1	Indikator I	8	42,11	4	21,05	1	5,26	0	0,00	6	31,58	19	100,00
2	Indikator II	2	50,00	0	0,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
3	Indikator III	3	42,86	1	14,28	0	0,00	0	0,00	3	42,86	7	100,00

Sumber : lampiran 5 diolah

Untuk indikator kedua, diketahui bahwa organisasi telah dengan sangat baik melakukan pengungkapan terkait informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan dan informasi penting lain yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Inkonsistensi organisasi terjadi dalam pengungkapan informasi tambahan mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Berkaitan dengan indikator ‘Prinsip Penyajian’, diketahui bahwa organisasi selalu menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relatif homogen, menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto serta menyajikan pendapatan, sumbangan dan kerugian sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat. Di lain pihak, organisasi tidak pernah melakukan penyajian atas jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar kendali organisasi dan manajemen secara *netto*, mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang serta menyajikan beban dan kerugian sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

Perhitungan total skor atas jawaban responden kemudian dilakukan dengan menjumlahkan seluruh skor untuk masing-masing pilihan jawaban yang dipilih oleh responden. Total skor yang didapat selanjutnya dibandingkan dengan skor ideal yang telah ditentukan, yang skor maksimal yang diperoleh jika seluruh responden memilih pilihan jawaban dengan nilai tertinggi. Hasilnya digunakan sebagai penentu kategori kriteria kepatuhan penerapan PSAK 45 untuk masing-masing responden. Tabel 4.31 memberikan rangkuman atas perhitungan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Tabel 4.31, dapat disimpulkan bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Bali tergolong ‘tidak patuh’ dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) dengan perolehan nilai interval skor sebesar 46,00%. Demikian pula untuk beberapa Palang Merah

Indonesia Kabupaten/Kota, yaitu Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng (52,00%), Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung (52,00%), Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem (45,30%), dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana (38,00%). Keempat Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota tersebut juga terkategori ‘Tidak Patuh’ dalam hal penerapan PSAK 45. Skor terendah diperoleh oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli (34,00%) dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan (25,30%) dengan kategori ‘Sangat Tidak Patuh’. Hasil yang lebih baik diperoleh oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar (71,30%), Palang Merah Indonesia Kota Denpasar (75,30%), dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung (68,70%). Ketiga Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota tersebut terkatogori ‘Patuh’ dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Tabel 4.31

Kepatuhan Penerapan PSAK 45 Palang Merah Indonesia Se-Provinsi Bali

No.	Unit Palang Merah Indonesia	Skor Jawaban					Total	Skor Ideal	Interval Persepsi	Kategori Kepatuhan	
		5	4	3	2	1					
1.	Provinsi Bali	Frekuensi	1	7	7	0	15	30	150	0,460	Tidak Patuh
	Total Skor	5	28	21	0	15	69				
2.	Kabupaten Buleleng	Frekuensi	5	2	9	4	10	30	150	0,520	Tidak Patuh
	Total Skor	25	8	27	8	10	78				
3.	Kabupaten Bangli	Frekuensi	0	3	6	0	21	30	150	0,340	Sangat Tidak Patuh
	Total Skor	0	24	18	0	21	63				
4.	Kabupaten Tabanan	Frekuensi	2	0	0	0	28	30	150	0,253	Sangat Tidak Patuh
	Total Skor	10	0	0	0	28	38				
5.	Kabupaten Klungkung	Frekuensi	5	4	8	0	13	30	150	0,520	Tidak Patuh
	Total Skor	25	16	24	0	13	78				
6.	Kabupaten Karangasem	Frekuensi	7	0	5	0	18	30	150	0,453	Tidak Patuh
	Total Skor	35	0	15	0	18	68				
7.	Kabupaten Gianyar	Frekuensi	11	3	11	2	3	30	150	0,713	Patuh
	Total Skor	55	12	33	4	3	107				
8.	Kabupaten Jembrana	Frekuensi	4	3	1	0	22	30	150	0,380	Tidak Patuh
	Total Skor	20	12	3	0	22	57				
9.	Kota Denpasar	Frekuensi	15	2	6	5	2	30	150	0,753	Patuh
	Total Skor	75	8	18	10	2	113				
10.	Kabupaten Badung	Frekuensi	13	5	3	0	9	30	150	0,687	Patuh
	Total Skor	65	20	9	0	9	103				

Sumber : data primer diolah

b. Persepsi Penyusun dan Pengguna Laporan Keuangan terhadap Penerapan PSAK 45

Tabel 4.32 dan Tabel 4.33 menampilkan rekapitulasi jawaban kuesioner pada masing-masing kelompok responden atas item pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelima item pertanyaan tersebut digunakan sebagai alat ukur persepsi responden berkaitan dengan indikator pengetahuan tentang PSAK 45. Masing-masing item pertanyaan merupakan pernyataan yang mewajibkan responden untuk memberikan tanggapan sesuai dengan persepsi yang dimiliki berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan.

Tabel 4.32
Jawaban Responden Kelompok Penyusun Laporan Keuangan
Atas Variabel Persepsi Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Nomor 1	2	6,67	13	43,33	2	6,67	10	33,33	3	10,00	30	100,00
2 Nomor 2	2	6,67	9	30,00	6	20,00	7	23,33	6	20,00	30	100,00
3 Nomor 3	1	3,33	6	20,00	7	23,33	9	30,00	7	23,33	30	100,00
4 Nomor 4	0	0,00	6	20,00	7	23,33	7	23,33	10	33,33	30	100,00
5 Nomor 5	0	0,00	7	23,33	8	26,67	7	23,33	8	26,67	30	100,00

Sumber : lampiran 6 diolah

Tabel 4.33
Jawaban Responden Kelompok Pengguna Laporan Keuangan
Atas Variabel Persepsi Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Nomor 1	9	30,00	16	53,33	0	0,00	1	3,33	4	13,33	30	100,00
2 Nomor 2	0	0,00	16	53,33	4	13,33	6	20,00	4	13,33	30	100,00
3 Nomor 3	0	0,00	13	43,33	8	26,67	5	16,67	4	13,33	30	100,00
4 Nomor 4	2	6,67	12	40,00	5	16,67	7	23,33	4	13,33	30	100,00
5 Nomor 5	1	3,33	10	33,33	8	26,67	10	33,33	1	3,33	30	100,00

Sumber : lampiran 6 diolah

Pertanyaan nomor 1 diberikan untuk mencari informasi mengenai pengetahuan responden tentang adanya standar baku sebagai pedoman bagi organisasi nirlaba dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Dari 30 orang

responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 13 orang (43,33%) menyatakan setuju, dua orang (6,67%) menyatakan kurang setuju, 10 orang (33,33%) menyatakan tidak setuju, dan tiga orang (10,00%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian responden kelompok penyusun laporan keuangan yang mengetahui bahwa terdapat standar baku sebagai pedoman bagi organisasi nirlaba dalam menyusun sebuah laporan keuangan.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa sembilan orang responden (30,00%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 16 orang (53,33%) menyatakan setuju, tidak ada responden (0,00%) yang memilih jawaban 'Kurang Setuju', satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan empat orang (13,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan telah mengetahui bahwa terdapat standar baku sebagai pedoman bagi organisasi nirlaba dalam menyusun sebuah laporan keuangan.

Pertanyaan nomor 2 diberikan untuk mencari informasi sehubungan dengan *awareness* responden atas eksistensi PSAK 45 sebagai standar baku pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, sembilan orang (30,00%) menyatakan setuju, enam orang (20,00%) menyatakan kurang setuju,

tujuh orang (23,33%) menyatakan tidak setuju, dan enam orang (20,00%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian responden kelompok penyusun laporan keuangan yang pernah mendengar tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 16 orang (53,33%) menyatakan setuju, empat orang (13,33%) menyatakan kurang setuju, enam orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan empat orang (13,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan pernah mendengar tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pertanyaan nomor 3 diberikan untuk mengetahui pengalaman responden berkaitan dengan pemberian informasi mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa satu orang responden (3,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, enam orang (20,00%) menyatakan setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan kurang setuju, sembilan orang (30,00%) menyatakan tidak setuju, dan tujuh orang (23,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan

keuangan tidak pernah mendapat informasi mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 13 orang (43,33%) menyatakan setuju, delapan orang (26,67%) menyatakan kurang setuju, lima orang (16,67%) menyatakan tidak setuju, dan empat orang (13,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden kelompok pengguna laporan keuangan yang pernah mendapat informasi mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pertanyaan nomor 4 diberikan untuk mencari informasi mengenai pengetahuan responden sehubungan dengan isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, enam orang (23,33%) menyatakan setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan kurang setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan tidak setuju, dan 10 orang (33,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden kelompok penyusun laporan keuangan yang mengetahui isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 12 orang (40,00%) menyatakan setuju, lima orang (16,67%) menyatakan kurang setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan tidak setuju, dan empat orang (13,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan tidak mengetahui isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pertanyaan nomor 5 diberikan untuk mencari informasi mengenai pemahaman responden atas praktek-praktek Akuntansi berkaitan dengan isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, tujuh orang (23,33%) menyatakan setuju, delapan orang (26,67%) menyatakan kurang setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan tidak setuju, dan delapan orang (26,67%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan tidak memahami praktek-praktek Akuntansi berkaitan dengan isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa satu orang responden (3,33%)

menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 10 orang (33,33%) menyatakan setuju, delapan orang (26,67%) menyatakan kurang setuju, 10 orang (33,33%) menyatakan tidak setuju, dan satu orang (3,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan tidak memahami praktek-praktek Akuntansi berkaitan dengan isi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Tabel 4.34 dan Tabel 4.35 menampilkan rekapitulasi jawaban kuesioner pada masing-masing kelompok responden atas item pertanyaan nomor 6, 7, dan 8. Ketiga item pertanyaan tersebut digunakan sebagai alat ukur persepsi responden berkaitan dengan indikator pandangan terkait legalitas PSAK 45.

Tabel 4.34
Jawaban Responden Kelompok Penyusun Laporan Keuangan
Atas Variabel Persepsi Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Nomor 6	2	6,67	14	46,67	8	26,67	5	16,67	1	3,33	30	100,00
2 Nomor 7	1	3,33	17	56,67	7	23,33	4	13,33	1	3,33	30	100,00
3 Nomor 8	2	6,67	11	36,67	12	40,00	4	13,33	1	3,33	30	100,00

Sumber : lampiran 6 diolah

Tabel 4.35
Jawaban Responden Kelompok Pengguna Laporan Keuangan
Atas Variabel Persepsi Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Nomor 6	3	10,00	19	63,33	8	26,67	0	0,00	0	0,00	30	100,00
2 Nomor 7	6	20,00	14	46,67	6	20,00	4	13,33	0	0,00	30	100,00
3 Nomor 8	3	10,00	22	73,33	4	13,33	1	3,33	0	0,00	30	100,00

Sumber : lampiran 6 diolah

Pertanyaan nomor 6 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden sehubungan dengan kapasitas PSAK 45 sebagai sebuah pedoman baku bagi organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangan. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 14 orang (46,67%) menyatakan setuju, delapan orang (26,67%) menyatakan kurang setuju, lima orang (16,67%) menyatakan tidak setuju, dan satu orang (3,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dijadikan sebagai pedoman yang baku dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa tiga orang responden (10,00%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 19 orang (63,33%) menyatakan setuju, delapan orang (26,67%) menyatakan kurang setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban 'Tidak Setuju' maupun pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bila Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dijadikan sebagai pedoman yang baku dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.

Pertanyaan nomor 7 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden sehubungan dengan kewajiban bagi organisasi nirlaba untuk menerapkan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa satu orang responden (3,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 17 orang (56,67%) menyatakan setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan kurang setuju, empat orang (13,33%) menyatakan tidak setuju, dan satu orang (3,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bila semua organisasi nirlaba diwajibkan untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam menyusun laporan keuangannya.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa enam orang responden (20,00%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 14 orang (46,67%) menyatakan setuju, enam orang (20,00%) menyatakan kurang setuju, empat orang (13,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bila semua organisasi nirlaba diwajibkan untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dalam menyusun laporan keuangannya.

Pertanyaan nomor 8 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden sehubungan dengan aspek hukum yang dimiliki oleh PSAK 45 sebagai sebuah

standar pelaporan keuangan. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 11 orang (36,67%) menyatakan setuju, 12 orang (40,00%) menyatakan kurang setuju, empat orang (13,33%) menyatakan tidak setuju, dan satu orang (3,33%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat untuk diterapkan oleh semua organisasi nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa tiga orang responden (10,00%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 22 orang (73,33%) menyatakan setuju, empat orang (13,33%) menyatakan kurang setuju, satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat untuk diterapkan oleh semua organisasi nirlaba.

Tabel 4.36 dan Tabel 4.37 menampilkan rekapitulasi jawaban kuesioner pada masing-masing kelompok responden atas item pertanyaan nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ketujuh item pertanyaan tersebut digunakan sebagai alat ukur

persepsi responden berkaitan dengan indikator pendapat mengenai penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia. Masing-masing item pertanyaan merupakan pernyataan yang mewajibkan responden untuk memberikan tanggapan sesuai dengan persepsi yang dimiliki berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan.

Tabel 4.35
Jawaban Responden Kelompok Penyusun Laporan Keuangan
Atas Variabel Persepsi Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Nomor 9	1	3,33	19	63,33	9	30,00	1	3,33	0	0,00	30	100,00
2 Nomor 10	1	3,33	20	66,67	9	30,00	0	0,00	0	0,00	30	100,00
3 Nomor 11	2	6,67	23	76,67	4	13,33	1	3,33	0	0,00	30	100,00
4 Nomor 12	1	3,33	23	76,67	5	16,67	1	3,33	0	0,00	30	100,00
5 Nomor 13	1	3,33	20	66,67	8	26,67	1	3,33	0	0,00	30	100,00
6 Nomor 14	2	6,67	19	63,33	7	23,33	2	6,67	0	0,00	30	100,00
7 Nomor 15	0	0,00	20	66,67	9	30,00	1	3,33	0	0,00	30	100,00

Sumber : lampiran 6 diolah

Tabel 4.37
Jawaban Responden Kelompok Pengguna Laporan Keuangan
Atas Variabel Persepsi Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45

No. Item Pertanyaan	Pilihan Jawaban										Total	
	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Σ	%
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1 Nomor 9	3	10,00	26	86,67	1	3,33	0	0,00	0	0,00	30	100,00
2 Nomor 10	4	13,33	24	80,00	2	6,67	0	0,00	0	0,00	30	100,00
3 Nomor 11	8	26,67	21	70,00	1	3,33	0	0,00	0	0,00	30	100,00
4 Nomor 12	5	16,67	24	80,00	1	3,33	0	0,00	0	0,00	30	100,00
5 Nomor 13	11	36,67	18	60,00	1	3,33	0	0,00	0	0,00	30	100,00
6 Nomor 14	6	20,00	22	73,33	1	3,33	0	0,00	1	3,33	30	100,00
7 Nomor 15	10	33,33	18	60,00	2	26,67	0	0,00	0	0,00	30	100,00

Sumber : lampiran 6 diolah

Pertanyaan nomor 9 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden sehubungan dengan isu penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa satu orang responden (3,33%) menyatakan sangat

setuju, 19 orang (63,33%) menyatakan setuju, sembilan orang (30,00%) menyatakan kurang setuju, satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan sangat tidak setuju atas pernyataan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan pedoman yang tepat digunakan oleh Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali dalam menyusun laporannya.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa tiga orang responden (10,00%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 26 orang (87,67%) menyatakan setuju, satu orang (3,33%) menyatakan kurang setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban 'Tidak Setuju' maupun pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan pedoman yang tepat digunakan oleh Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali dalam menyusun laporan keuangannya.

Pertanyaan nomor 10 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang akan diperoleh sehubungan dengan kualitas pelayanan organisasi atas penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan,

diketahui bahwa satu orang responden (3,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 20 orang (66,67%) menyatakan setuju, sembilan orang (30,00%) menyatakan kurang setuju, dan tidak ada responden (0,00%) yang memilih baik jawaban 'Tidak Setuju' maupun 'Sangat Tidak Setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali akan semakin meningkat dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa empat orang responden (13,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 24 orang (80,00%) menyatakan setuju, dua orang (6,67%) menyatakan kurang setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban 'Tidak Setuju' maupun pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali akan semakin meningkat dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Pertanyaan nomor 11 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang akan diperoleh atas penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali sehubungan dengan aspek akuntabilitas

dan transparansi organisasi. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 23 orang (76,67%) menyatakan setuju, empat orang (13,33%) menyatakan kurang setuju, satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali akan dapat meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasinya.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa delapan orang responden (26,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 21 orang (70,00%) menyatakan setuju, satu orang (3,33%) menyatakan kurang setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban 'Tidak Setuju' maupun pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali akan dapat meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasinya.

Pertanyaan nomor 12 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang akan diperoleh atas penerapan PSAK 45 pada Palang

Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali sehubungan dengan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan organisasi. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa satu orang responden (3,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 23 orang (76,67%) menyatakan setuju, lima orang (16,67%) menyatakan kurang setuju, satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali akan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa lima orang responden (16,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 24 orang (80,00%) menyatakan setuju, satu orang (3,33%) menyatakan kurang setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban 'Tidak Setuju' maupun pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali akan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya.

Pertanyaan nomor 13 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang akan diperoleh para pengguna laporan keuangan atas penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali sehubungan dengan kemudahannya dalam menilai kualitas jasa yang diberikan oleh organisasi. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa satu orang responden (3,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 20 orang (66,67%) menyatakan setuju, delapan orang (26,67%) menyatakan kurang setuju, satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali, pengguna laporan keuangan akan mendapat kemudahan dalam menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa 11 orang responden (36,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 18 orang (60,00%) menyatakan setuju, satu orang (3,33%) menyatakan kurang setuju, dan tidak satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban 'Tidak Setuju' maupun pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa dengan diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali, pengguna laporan keuangan akan mendapat kemudahan dalam menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.

Pertanyaan nomor 14 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai manfaat yang akan diperoleh para pengguna laporan keuangan atas penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia di wilayah Provinsi Bali sehubungan dengan kemudahannya untuk mengevaluasi kinerja manajer dalam mengelola organisasi. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa dua orang responden (6,67%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 19 orang (63,33%) menyatakan setuju, tujuh orang (23,33%) menyatakan kurang setuju, dua orang (6,67%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali dalam menilai cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerja manajer.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa enam orang responden (10,00%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 22 orang (87,67%) menyatakan setuju, satu orang (3,33%) menyatakan kurang setuju, tidak ada

responden (0,00%) yang menyatakan tidak setuju, namun ada satu orang (3,33%) yang memilih pilihan jawaban 'Sangat Tidak setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali dalam menilai cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerja manajer.

Pertanyaan nomor 15 diberikan untuk mengetahui tanggapan responden sehubungan dengan isu penerapan PSAK 45 pada Palang Merah Indonesia di wilayah provinsi Bali. Dari 30 orang responden kelompok penyusun laporan keuangan, diketahui bahwa tidak ada responden (0,00%) yang menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 20 orang (66,67%) menyatakan setuju, sembilan orang (30,00%) menyatakan kurang setuju, satu orang (3,33%) menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0,00%) yang memilih jawaban 'Sangat Tidak Setuju'. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan setuju bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Bali memang sudah seharusnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan organisasi.

Untuk kelompok pengguna laporan keuangan, dari 30 orang responden yang menjadi subyek penelitian, diketahui bahwa 10 orang responden (33,33%) menyatakan sangat setuju atas pernyataan yang diberikan, 18 orang (60,00%) menyatakan setuju, dua orang (2,67%) menyatakan kurang setuju, dan tidak

satupun responden (0,00%) yang memilih baik pilihan jawaban ‘Tidak Setuju’ maupun pilihan jawaban ‘Sangat Tidak setuju’. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden kelompok pengguna laporan keuangan setuju bahwa Palang Merah Indonesia Provinsi Bali memang sudah seharusnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan organisasi.

Tabel 4.38 menampilkan perolehan skor kategori persepsi untuk kelompok penyusun laporan keuangan pada ketiga indikator terkait variabel ‘Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45’. Untuk indikator ‘Pengetahuan Tentang PSAK 45’ diperoleh skor sebesar 52,40% atau terkategori ‘Kurang Setuju’. Ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan para penyusun laporan keuangan yang menjadi subjek penelitian atas eksistensi PSAK 45 sebagai standar baku pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba non-pemerintah. Demikian pula untuk indikator ‘Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45’ yang terkategori ‘Kurang Setuju’ dan berada pada skor 67,30%. Ini menunjukkan tingkat kesadaran para penyusun laporan keuangan yang juga masih rendah terkait kekuatan hukum yang dimiliki oleh standar pelaporan keuangan tersebut.

Persepsi yang kurang baik atas dua indikator tersebut mungkin disebabkan karena memang selama ini penyusunan laporan keuangan pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali masih mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan yang ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Faktor sumber

daya manusia yang dimiliki juga dapat dijadikan jawaban atas permasalahan ini. Sebesar 40,00% jumlah penyusun laporan keuangan hanya memiliki ijazah pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Data demografi juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden kelompok penyusun laporan keuangan tidak pernah mengikuti pelatihan kedinasan di bidang keuangan (66,67%) dan juga tidak memiliki pengetahuan keuangan berbasis Akuntansi (56,67%).

Persepsi yang lebih baik diberikan terkait indikator ‘Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali’. Dengan perolehan skor kategori sebesar 74,60%, persepsi para penyusun laporan keuangan sehubungan dengan indikator tersebut dapat dikategorikan ‘Setuju’ (Tabel 4.38). Ini menunjukkan bahwa responden kelompok penyusun laporan keuangan akan menyambut positif bila nantinya ditetapkan sebuah kebijakan untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 dalam penyusunan laporan keuangan di organisasi tersebut.

Tabel 4.38

**Persepsi Penyusun Laporan Keuangan
Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45**

No.	Variabel/Indikator	Skor Jawaban					Total	Skor Ideal	Interval Persepsi	Kategori Persepsi	
		5	4	3	2	1					
1.	Variabel Persepsi	Frekuensi	120	32	27	0	49	228	2250	0,657	Kurang Setuju
	Total Skor	600	128	81	0	49	858				
2.	Indikator I	Frekuensi	5	41	30	40	34	150	750	0,524	Kurang Setuju
	Total Skor	25	164	90	80	34	393				
3.	Indikator II	Frekuensi	5	42	27	13	3	90	450	0,673	Kurang Setuju
	Total Skor	25	168	81	26	3	303				
4.	Indikator II	Frekuensi	8	144	51	7	0	210	1050	0,746	Setuju
	Total Skor	40	576	153	14	0	783				

Sumber : lampiran 6 diolah

Jadi, secara umum, dapat disimpulkan bahwa kelompok penyusun laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali kurang setuju terhadap isu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Ini terlihat dari interval skor yang diperoleh terkait variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' yaitu sebesar 65,70% atau berada dalam kategori 'Kurang Setuju'.

Tabel 4.39 menampilkan perolehan skor kategori persepsi untuk kelompok pengguna laporan keuangan pada ketiga indikator terkait variabel 'Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45'. Untuk indikator 'Pengetahuan Tentang PSAK 45' diperoleh skor sebesar 63,70% atau terkategori 'Kurang Setuju'. Ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan para pengguna laporan keuangan yang menjadi subjek penelitian atas eksistensi PSAK 45 sebagai standar baku pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba non-pemerintah.

Ini mungkin disebabkan oleh pengalaman yang dimiliki responden berkaitan dengan keikutsertaan dalam pelatihan kedinasan bidang keuangan. Sebagian besar responden (80,00%) tidak pernah mengikuti pelatihan kedinasan yang dimaksud. Hal lain yang juga dapat dipertimbangkan adalah basis pengetahuan standar pelaporan keuangan yang dimiliki adalah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memang khusus diperuntukkan untuk pelaporan keuangan pada instansi pemerintah.

Persepsi yang lebih baik diberikan dalam hal indikator 'Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45' yang terkategori 'Setuju' dan berada pada skor 76,40%. Ini menunjukkan tingkat kesadaran para pengguna laporan keuangan yang sudah

tergolong baik terkait kekuatan hukum yang dimiliki oleh standar pelaporan keuangan tersebut. Demikian pula untuk indikator ‘Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali’. Dengan perolehan skor kategori sebesar 83,33%, persepsi para penyusun laporan keuangan sehubungan dengan indikator tersebut dapat dikategorikan ‘Setuju’ (Tabel 4.39). Ini menunjukkan bahwa responden kelompok penyusun laporan keuangan akan menyambut positif bila nantinya ditetapkan kebijakan untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 dalam penyusunan laporan keuangan di organisasi tersebut.

Jadi, secara umum, dapat disimpulkan bahwa kelompok pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali setuju terhadap isu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Ini terlihat dari interval skor yang diperoleh terkait variabel ‘Persepsi Penerapan PSAK 45’ yaitu sebesar 75,40% atau berada dalam kategori ‘Setuju’.

Tabel 4.39

**Persepsi Pengguna Laporan Keuangan
Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45**

No.	Variabel/Indikator	Skor Jawaban					Total	Skor Ideal	Interval Persepsi	Kategori Persepsi
		5	4	3	2	1				
1. Variabel Persepsi	Frekuensi	71	275	52	34	18	450	2250	0,754	Setuju
	Total Skor	355	1100	156	68	18	1697			
2. Indikator I	Frekuensi	12	67	25	29	17	150	750	0,637	Kurang Setuju
	Total Skor	60	268	75	58	17	478			
3. Indikator II	Frekuensi	12	55	18	5	0	90	450	0,764	Setuju
	Total Skor	60	220	54	10	0	344			
4. Indikator II	Frekuensi	47	153	9	0	1	210	1050	0,833	Setuju
	Total Skor	235	612	27	0	1	875			

Sumber : lampiran 6 diolah

4.4. Uji Normalitas Data

Dengan menggunakan bantuan program *SPSS for Windows* versi 11.5 dan uji *Kolmogrov-Smirnov Test*, diperoleh nilai normalitas data untuk setiap indikator terkait variabel ‘Persepsi Penerapan PSAK 45’ pada masing-masing kelompok responden sebagai berikut:

Tabel 4.40

**Hasil Uji Normalitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45
Kelompok Penyusun Laporan Keuangan**

No.	Indikator	Sig.	Keterangan
1	Pengetahuan tentang PSAK 45	0,449	Terdistribusi Normal
2	Pandangan terkait Legalitas PSAK 45	0,184	Terdistribusi Normal
3	Pendapat mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali	0,041	Tidak Terdistribusi Normal

Sumber : lampiran 8 diolah

Berdasarkan Tabel 4.40 diketahui bahwa pada kelompok penyusun laporan keuangan, indikator ‘Pengetahuan Tentang PSAK 45’ dan ‘Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45’ memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal. Untuk indikator ‘Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali’ memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga data yang diperoleh dikatakan tidak terdistribusi normal.

Tabel 4.41

**Hasil Uji Normalitas Variabel Persepsi Penerapan PSAK 45
Kelompok Pengguna Laporan Keuangan**

No.	Indikator	Sig.	Keterangan
1	Pengetahuan tentang PSAK 45	0,297	Terdistribusi Normal
2	Pandangan terkait Legalitas PSAK 45	0,096	Terdistribusi Normal
3	Pendapat mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali	0,085	Terdistribusi Normal

Sumber : lampiran 8 diolah

Berdasarkan Tabel 4.41 diketahui bahwa pada kelompok pengguna laporan keuangan, indikator pengetahuan tentang PSAK 45, pandangan terkait legalitas PSAK 45, dan pendapat mengenai penerapan PSAK 45 di PMI Bali memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh untuk ketiga indikator tersebut terdistribusi normal.

4.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistik *t-test Independent* untuk indikator ‘Pengetahuan tentang PSAK 45’ dan indikator ‘Pandangan terkait Legalitas PSAK 45’ serta uji statistik *Mann-Whitnet Test* untuk indikator ‘Pendapat mengenai Penerapan PSAK 45 di Palang Merah Indonesia se-Provinsi Bali’. Hasil pengujian ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.42

Hasil Uji t Indikator Pengetahuan Tentang PSAK 45

No.	Kelompok Responden	Mean	Std. Deviation	Homogenitas	Sig. Uji t	Keterangan
1	Penyusun Laporan Keuangan	2,6200	1,03770	0,088	0,021	Terdapat Perbedaan Persepsi
2	Pengguna Laporan Keuangan	3,1867	0,80161			

Sumber : lampiran 8 diolah

Tabel 4.42 menampilkan hasil pengujian dengan menggunakan uji *t-test independent* untuk indikator ‘Pengetahuan tentang PSAK 45’. Diketahui bahwa nilai probabilitas berkaitan dengan tingkat homogenitas data adalah 0,088 atau lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa varians kedua kelompok responden dapat diasumsikan sama (homogen). Dengan asumsi ini, diperoleh nilai signifikansi *t-test* sebesar 0,021 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga diambil keputusan untuk menolak H_0 atau menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat perbedaan persepsi

antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki tentang penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45.

Tabel 4.43

Hasil Uji t Indikator Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45

No.	Kelompok Responden	Mean	Std. Deviation	Homogenitas	Sig. Uji t	Keterangan
1	Penyusun Laporan Keuangan	3,3667	0,75481	0,042	0,010	Terdapat Perbedaan Persepsi
2	Pengguna Laporan Keuangan	3,8222	0,55869			

Sumber : lampiran 8 diolah

Tabel 4.43 menampilkan hasil pengujian dengan menggunakan uji *t-test independent* untuk indikator ‘Pandangan terkait Legalitas PSAK 45’. Diketahui bahwa nilai probabilitas berkaitan dengan tingkat homogenitas data adalah 0,042 atau lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa varians kedua kelompok responden dapat diasumsikan berbeda (tidak homogen). Dengan asumsi ini, diperoleh nilai signifikansi *t-test* sebesar 0,010 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga diambil keputusan untuk menolak H_0 atau menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali berkaitan dengan pandangan terkait legalitas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45.

Tabel 4.44

**Hasil Uji Mann-Whitney Test
Indikator Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali**

No.	Kelompok Responden	Mean Rank	Sig.	Keterangan
1	Penyusun Laporan Keuangan	21,87	0,000	Terdapat Perbedaan Persepsi
2	Pengguna Laporan Keuangan	39,13		

Sumber : lampiran 8 diolah

Tabel 4.44 menampilkan hasil pengujian dengan menggunakan uji *Mann-Whitney Test* untuk indikator ‘Pendapat mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI Bali’. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga diambil keputusan untuk menolak H_0 atau menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam hal pendapat yang diberikan mengenai kewajiban penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.

Tabel 4.45

Hasil Uji t Variabel Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45

No.	Kelompok Responden	Mean	Std. Deviation	Homogenitas	Sig. Uji t	Keterangan
1	Penyusun Laporan Keuangan	3,2867	0,61704	0,003	0,000	Terdapat Perbedaan Persepsi
2	Pengguna Laporan Keuangan	3,7711	0,32315			

Sumber : lampiran 8 diolah

Tabel 4.45 menampilkan hasil pengujian dengan menggunakan uji *t-test independent* untuk variabel ‘Persepsi terhadap Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45’. Diketahui bahwa nilai probabilitas berkaitan dengan tingkat homogenitas data adalah 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa varians kedua kelompok responden dapat diasumsikan

berbeda (tidak homogen). Dengan asumsi ini, diperoleh nilai signifikansi t-test sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga diambil keputusan untuk menolak H_0 atau menerima H_1 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, terdapat perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45.

Penolakan terhadap H_0 yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara penyusun dan pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terhadap penerapan PSAK 45 semakin menguatkan teori persepsi yang dikemukakan oleh para ahli. Robbins (2003:125) menyatakan bahwa persepsi masing-masing individu dalam menyikapi suatu permasalahan akan senantiasa berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik pribadi yang dimiliki masing-masing individu (*perceiver*) seperti sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Faktor lingkungan (*situation*) di mana seseorang berinteraksi seperti lokasi, keadaan cuaca, faktor situasional dan suhu bisa jadi mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Terakhir adalah faktor sasaran (*targets*) itu sendiri.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, faktor karakteristik pribadi sepertinya memegang peranan besar dalam pembentukan persepsi responden terhadap isu penerapan PSAK 45, disamping juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor lainnya. Perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki antar kelompok responden dapat menjadi salah satu alasan. Sebagian besar responden kelompok penyusun laporan keuangan hanya berijazah sekolah menengah atas/ sederajat sedangkan lebih dari setengah anggota kelompok pengguna laporan keuangan telah menyangang gelas sarjana. Tanpa bermaksud membuat suatu generalisasi, perbedaan latar belakang pendidikan tersebut tentunya akan mempengaruhi *mindset* responden di antara kedua kelompok dalam menyikapi suatu hal.

Faktor karakteristik pribadi lain yang juga mempengaruhi mungkin berkaitan dengan motivasi yang dimiliki responden. Responden kelompok penyusun laporan keuangan sepertinya masih 'nyaman' dengan diberlakukannya standar pelaporan lama yang selama ini digunakan. Penerapan PSAK 45 pada organisasi akan menimbulkan beberapa penyesuaian dalam sistem yang berlaku di organisasi. Beberapa individu cenderung bersikap antipati terhadap adanya kemungkinan perubahan kondisi dalam lingkungan kerja.

Faktor lain yang patut diperhatikan adalah sehubungan dengan kondisi lingkungan saat proses pengisian kuesioner dilakukan. Responden mungkin berada dalam kondisi yang tidak kondusif, misalnya sedang terburu-buru, menghadapi permasalahan tertentu dan sebagainya yang dapat mengaburkan kompetensi yang dimiliki untuk pengisian kuesioner.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng, Palang Merah Indonesia Kabupaten Klungkung, Palang Merah Indonesia Kabupaten Karangasem, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Jembrana terkategori ‘Tidak Patuh’ dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45). Sementara itu, Palang Merah Indonesia Kabupaten Bangli dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabanan berada dalam kriteria ‘Sangat Tidak Patuh’, sedangkan Palang Merah Indonesia Kabupaten Gianyar, Palang Merah Indonesia Kota Denpasar, dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Badung dapat dikatakan telah mencapai kategori ‘Patuh’ berdasarkan kriteria kepatuhan yang ditetapkan dalam penelitian ini.
- b. Para penyusun laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Bali yang menjadi subyek penelitian memberikan persepsi yang kurang baik atau kurang setuju terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45).

- c. Para pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Bali yang menjadi subyek penelitian memberikan persepsi yang baik atau setuju terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45).
- d. Terdapat perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan yang menjadi subyek penelitian pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Bali terhadap penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45).

5.2. Saran

- a. Pengukuran terhadap tingkat kepatuhan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 pada Palang Merah Indonesia Provinsi dan Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali menunjukkan nilai rata-rata yang kurang memuaskan. Ini mungkin disebabkan karena masih diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia Pusat dan berlaku untuk seluruh Palang Merah Indonesia Provinsi dan Palang Merah Indonesia Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian dan pemikiran bersama antara pihak-pihak terkait. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai badan pengembang standar pelaporan keuangan di Indonesia perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif berkaitan dengan penerapan PSAK 45 sekaligus mengajak Palang Merah Indonesia untuk

bersama-sama mencari pemecahan atas masalah dualisme kewajiban pelaporan keuangan tersebut. Mungkin nantinya akan diperlukan beberapa penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PSAK 45 sehingga dapat mengakomodasi kepentingan di antara beberapa pihak yang berkepentingan.

- b. Sehubungan dengan hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan terhadap penerapan PSAK 45, diperlukan mediasi oleh lembaga yang berkompeten yaitu Ikatan Akuntan Indonesia dalam hal sosialisasi penerapan standar pelaporan keuangan tersebut. Bagaimanapun juga, kelompok penyusun dan pengguna laporan keuangan seharusnya memiliki persamaan persepsi berkaitan dengan standar pelaporan keuangan yang digunakan oleh organisasi sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat sama-sama dipahami oleh kedua belah pihak dalam rangka terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- c. Penelitian ini dilakukan pada kelompok pengguna laporan keuangan tertentu sehingga tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi pada seluruh populasi pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi dan Indonesia Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Hasil penelitian hanya berlaku pada kelompok responden yang menjadi subjek penelitian. Untuk selanjutnya, diperlukan pengembangan terhadap ruang lingkup pengambilan sampel sehingga dapat lebih menggeneralisasi sifat dan karakteristik populasi pengguna laporan keuangan organisasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Elqorny. 2009. *Mengenal Teori Keagenan*, (Online), (<http://kelembagaan.das.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory>, diakses 3 Maret 2011).
- AndaiYaniUBB. 2009. *Pengertian Organisasi*, (Online), (<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/1931281-pengertian-organisasi>, diakses 23 April 2011).
- AnneAhira.com Content Team. 2011. *Pengertian Organisasi Secara Umum*, (Online), (<http://www.annehira.com/pengertian-organisasi.htm>, diakses 20 April 2011).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Baltus. 1983. *Personal Psychology for Life and Work*. New York: McGraw Hill.
- Bali Post. 2010, 22 Desember. *Diduga, Pengadaan Barang PMI Badung Di- "mark up"*. hlm. 2.
- Boone, Louis E, David I. Kurtz. 2000. *Pengantar Bisnis*. Edisi 2000 yang diperbaharui, Jilid 2. Terjemahan oleh Fadriansyah Anwar. Jakarta: Erlangga.
- Darmasari, Shinta. 2005. *Manfaat Akuntansi Dana Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaporan Keuangan Gereja*. Skripsi diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2*.
- Glaeser, Edward L. & Andrei Shleifer. 2001. *Not-For-Profit Entrepreneurs*, (Online), (<http://www.nber.org/papers/w6810>, diakses 12 Maret 2011).
- Gunawan, dkk. 2005. *MEMBANGUN INDONESIA EMAS: Menuju Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul dalam Persaingan Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hertanto W. 2011. *Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-jenis Dana Organisasi Nirlaba*, (Online), (<http://id.shvoong.com/accounting/2138209-pengertian-karakteristik-dan-jenis-jenis>, diakses 30 Mei 2011).

<http://bataviase.co.id>

<http://www.iicg.org>

<http://www.keuanganism.com>

<http://www.iaiglobal.or.id>

<http://www.pmi.or.id>

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Jan Hoesada. Tanpa Tahun. *Akuntansi Organisasi Nirlaba*, (Online), (<http://www.scribd.com/doc/39109584/akuntansi-organisasi-nirlaba>, diakses 28 Februari 2011).

Karengga, Dewi Manis. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi dalam Memilih Karir Sebagai Akuntan Publik*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Kieso, Donald, Jerry Weygandt, dan Terry D Warfield. 2001. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Kesepuluh. Jilid 1. Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Erlangga.

KOMPAS. 2011, 11 Juni. *Kesadaran Masyarakat Masih Rendah*. hlm. 8.

Kusnadi, dkk. 1999. *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*. Edisi Kedua. Malang: Universitas Brawijaya.

Luthans, Fred. 1998. *Organization Behaviour*. Eight Edition. Boston: Irwin McGraw Hill.

Madura, Jeff. 2007. *Pengantar Bisnis 1*. Edisi 4. Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto dan Krista. 2007. Jakarta: Salemba Empat

Meryna Rantiningtyas. 2009. *SAK (Standar Akuntansi Keuangan)*, (Online), (<http://meryna.web.id/?s=standar+akuntansi+keuangan>, diakses 23 April 2011).

- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdiono. 2007. *Penerapan PSAK Nomor 45 pada Organisasi Pengelola Zakat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, (Online), Vol. 12, No. 1, ([http://lemlit.unila.ac.id/file/1-Semua-\(word\).pdf](http://lemlit.unila.ac.id/file/1-Semua-(word).pdf), diakses 3 Maret 2011).
- Organ, Dennis W. dan Thomas Bateman. 1986. *Organization Behaviour: An Applied Psychological Approach*. Homewood, Illionis: Richard D. Irwin, Inc.
- Prastowo, Dwi dan Rifka Julianti. 2002. *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*. Edisi Revisi. Yogyakarta: YPKN.
- Pusparini, Nidya. 2010. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan (Survei Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)*. Skripsi diterbitkan. Bandung: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
- Rahmawati, Annisa. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Sebagai Acuan Penyusunan Laporan Keuangan KONI Provinsi Jawa Timur*. Skripsi diterbitkan. Surabaya: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
- Republik Indonesia. *Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. 2000. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal.
- . *Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. 1995. Jakarta: Badan Pengawas Pasar Modal.
- Sabeni, Arifin dan Imam Ghozali. 1995. *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Salusu, J. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : PT Gramedia.
- Soetedjo, Soegeng. 2009. *Pembahasan Pokok-pokok Pikiran Teori Akuntansi Vernon Kam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Stephen P. Robbins. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep. Kontroversi. Aplikasi*. Edisi Kedelapan. Terjemahan oleh Pujaatmaka dan Benyamin Molan. 2001. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15. Bandung: Alfabeta

Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Yogyakarta: BPFU UGM

Syahrul dan Afdi Nizar. 2000. *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.

Thoha, Miftah. 1993. *Perilaku Organisasi: Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Perkasa.

Yadiati, Winwin. 2007. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group

Yuhanis Ladewi dan Wita Andaryani. 2005. *Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Penggunaan dan Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang*, Fordema. (Online), Volume 5, Nomor 1, (<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal>, diakses 13 Maret 2011).



Lampiran 3

KUESIONER

- **Petunjuk:** Beri tanda pada kolom pilihan jawaban yang sesuai dengan praktek yang terjadi di organisasi Anda. Tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah dalam kuesioner ini. Mohon dijawab sesuai dengan praktek yang terjadi di organisasi Anda.

- **Keterangan:**

TP = Tidak Pernah
 HTP = Hampir Tidak Pernah
 K = Kadang-kadang
 SR = Sering
 SL = Selalu

I Indikator : Prinsip Pengakuan

- a) Berikut ini adalah daftar akun yang merupakan unsur-unsur laporan keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk satu periode. **Seberapa sering pencatatan atas akun-akun berikut dilakukan oleh organisasi Anda?**

No.	Nama Akun	Frekuensi Pencatatan				
		TP	HTP	K	SR	SL
1.	Kas dan Setara Kas					
2.	Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain					
3.	Persediaan					
4.	Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka					
5.	Tanah, bangunan dan peralatan					
6.	Hutang jangka pendek (hutang dagang; kewajiban tahunan)					
7.	Hutang jangka panjang (jatuh tempo lebih dari 1 tahun)					
8.	Aktiva bersih tidak terikat					
9.	Pendapatan atau penghasilan dari sumbangan					
10.	Pendapatan atau penghasilan dari kegiatan operasional					
11.	Pendapatan lain-lain					
12.	Beban operasional (beban gaji; beban listrik,air,telepon)					

Terima Kasih Karena Anda Telah Memberikan Jawaban Yang Jujur & Objektif Page 1

No.	Nama Akun	Frekuensi Pencatatan				
		TP	HTP	K	SR	SL
13.	Beban non-operasional (beban penyusutan; beban pemeliharaan)					
14.	Keuntungan operasional					
15.	Keuntungan non-operasional					
16.	Kerugian operasional (kerugian program; manajemen & umum)					
17.	Kerugian non-operasional (kerusakan peralatan; bencana)					
18.	Kas dari aktivitas operasi					
19.	Kas dari pendapatan kegiatan					
20.	Kas dari sumbangan					
21.	Kas dari piutang					
22.	Kas dari pendapatan bunga					
23.	Kas dari sumber pendapatan lain-lain					
24.	Bunga yang dibayarkan					
25.	Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier					
26.	Hutang lain-lain yang dilunasi					
27.	Penerimaan kas dari penjualan aktiva non-persediaan					
28.	Pengeluaran kas untuk pembelian aktiva non-persediaan					

- b) Berikut adalah beberapa kriteria pengakuan atas unsur-unsur dalam laporan keuangan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk satu periode, **bagaimana organisasi Anda menerapkan kriteria-kriteria tersebut?**

No.	Kriteria Pengakuan	Penerapan di Organisasi				
		TP	HTP	K	SR	SL
29.	Aktiva diakui jika besar kemungkinan bahwa organisasi memperoleh manfaat ekonomi atas aktiva tersebut di masa depan dan juga aktiva tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan Andal.					
30.	Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa di masa depan organisasi akan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban itu dengan jumlah penyelesaian yang dapat diukur dengan Andal.					
31.	Penghasilan diakui jika telah terjadi kenaikan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban serta dapat diukur dengan Andal.					
32.	Beban diakui jika telah terjadi penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban serta dapat diukur dengan Andal.					

II Indikator : Prinsip Pengukuran

Berikut diberikan beberapa pernyataan berkaitan dengan metode pengukuran atas unsur-unsur dalam laporan keuangan. Bagaimana organisasi Anda menerapkan prinsip-prinsip tersebut?

No.	Prinsip Pengukuran	Penerapan di Organisasi				
		TP	HTP	K	SR	SL
33..	Organisasi mengukur transaksi-transaksi yang terjadi dengan menggunakan prinsip Harga Perolehan (Historical Cost)					
34.	Organisasi mengukur aktiva non-kas dengan menggunakan prinsip Harga Pasar Sekarang (Current Market Value)					

III Indikator : Prinsip Pengungkapan

Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan prinsip pengungkapan dalam laporan keuangan. **Bagaimana organisasi Anda menerapkan prinsip-prinsip tersebut?**

No.	Prinsip Pengungkapan	Penerapan di Organisasi				
		TP	HTP	K	SR	SL
35.	Organisasi memberikan informasi tambahan mengenai dasar kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.					
36.	Organisasi memberikan informasi tambahan berupa rincian sumber daya dan kewajiban yang tidak tercantum pada bagian utama laporan keuangan.					
37.	Organisasi memberikan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban, termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.					
38.	Organisasi memberikan informasi penting lain yang perlu diketahui oleh pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.					

III Indikator : Prinsip Penyajian

Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan prinsip penyajian dalam laporan keuangan. **Bagaimana organisasi Anda menerapkan prinsip-prinsip tersebut?**

No.	Prinsip Penyajian	Penerapan di Organisasi				
		TP	HTP	K	SR	SL
39.	Organisasi menyajikan Laporan Posisi Keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut.					
40.	Organisasi menyajikan Laporan Aktivitas dalam rangka menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi atau peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih serta informasi mengenai penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.					

No.	Prinsip Penyajian	Penerapan di Organisasi				
		TP	HTP	K	SR	SL
41.	Organisasi menyajikan Laporan Arus Kas dalam rangka menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.					
42.	Organisasi menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka menyediakan informasi tambahan untuk memperkuat atau memperjelas makna dari pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan.					
43.	Organisasi menyajikan akun aktiva dan kewajiban dengan pengumpulan atas unsur-unsur tersebut ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik serupa dan relatif homogen					
44.	Organisasi menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo.					
45.	Organisasi mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.					
46.	Organisasi menyajikan pendapatan, sumbangan dan kerugian sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat.					
47.	Organisasi menyajikan beban dan kerugian sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.					
48.	Organisasi menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto.					
49.	Organisasi menyajikan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar kendali organisasi dan manajemen secara netto.					



Lampiran 3

KUESIONER

PERSEPSI TERHADAP PENERAPAN PSAK 45

- **Petunjuk:** Beri tanda pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pengetahuan, pandangan, pemahaman dan pendapat anda sehubungan dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan.

I. Indikator : Pengetahuan Tentang PSAK 45

1. Saya mengetahui bahwa terdapat standar baku sebagai pedoman bagi organisasi nirlaba dalam menyusun sebuah laporan keuangan.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Saya pernah mendengar tentang “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba“.
 - a. Sangat Tidak Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Setuju
 - e. Sangat Setuju
3. Saya pernah mendapat informasi mengenai “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba“.
 - a. Sangat Tidak Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Setuju
 - e. Sangat Setuju

4. Saya mengetahui isi dari “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”.
 - a. Sangat Tidak Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Setuju
 - e. Sangat Setuju
5. Saya memahami serta mengerti praktek-praktek Akuntansi berkaitan dengan isi dari “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”.
 - a. Sangat Tidak Setuju
 - b. Tidak Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Setuju
 - e. Sangat Setuju

II. Indikator : Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45

6. Menurut saya, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” merupakan sebuah pedoman yang baku dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
7. Menurut saya, semua organisasi nirlaba wajib menerapkan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” dalam menyusun laporan keuangannya.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

8. Menurut saya, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat untuk diterapkan oleh semua organisasi nirlaba.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju

III. Indikator : Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI

9. Menurut saya, “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” merupakan pedoman yang tepat digunakan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Bali dalam menyusun laporan keuangannya.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
10. Menurut saya, dengan menerapkan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Bali akan semakin meningkat.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
11. Menurut saya, dengan menerapkan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali akan dapat meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan organisasinya.
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Kurang Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju

12. Menurut saya, dengan menerapkan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali akan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangannya.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
13. Penerapan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali dalam menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
- Sangat Setuju
 - Setuju
 - Kurang Setuju
 - Tidak Setuju
 - Sangat Tidak Setuju
14. Penerapan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali dalam menilai cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerja manajer.
- | | |
|------------------------|------------------|
| a. Sangat Tidak Setuju | d. Setuju |
| b. Tidak Setuju | e. Sangat Setuju |
| c. Kurang Setuju | |
15. Menurut saya, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali memang sudah seharusnya menerapkan “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”, sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan.
- | | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| a. Sangat Tidak Setuju | c. Kurang Setuju | e. Sangat Setuju |
| b. Tidak Setuju | d. Setuju | |

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner 'Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45'

No. Soal	RESPONDEN										MEAN
	PMI Provinsi Bali	PMI Kab. Buleleng	PMI Kab. Bangli	PMI Kab. Tabanan	PMI Kab. Klungkung	PMI Kab. Karangasem	PMI Kab. Gianyar	PMI Kab. Jembrana	PMI Kota Denpasar	PMI Kab. Badung	
	skor	skor	skor	skor	skor	skor	skor	skor	skor	skor	
1	4	5	4	5	4	5	1	5	5	5	4,300
2	1	3	1	1	1	1	3	1	2	5	1,900
3	4	1	1	1	5	3	5	1	5	4	3,000
4	3	1	1	1	1	1	3	1	2	5	1,900
5	1	5	1	1	4	1	4	1	2	3	2,300
6	1	1	1	1	1	1	5	1	2	1	1,500
7	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,100
8	1	3	1	1	1	1	3	1	5	5	2,200
9	4	3	4	5	3	3	3	4	5	5	3,900
10	4	5	1	1	3	3	4	4	5	5	3,500
11	4	3	4	5	3	1	4	5	5	5	3,900
12	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4,700
13	3	4	4	5	3	5	5	1	5	1	3,600
14	1	1	1	1	3	3	1	3	1	5	1,800
15	1	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1,600
16	1	1	1	1	3	3	3	1	5	1	2,000
17	4	1	4	1	3	5	3	1	5	3	3,000
18	3	5	1	1	1	1	2	4	5	4	2,700
19	3	3	3	1	3	1	3	3	5	4	2,900
20	3	2	4	5	3	3	5	4	5	5	3,900
21	1	1	1	1	1	5	4	1	3	5	2,300
22	3	3	4	5	3	5	3	1	5	5	3,700
23	3	3	3	1	1	1	4	5	5	5	3,100
24	1	2	3	1	1	1	4	1	1	1	1,600
25	1	4	4	1	3	5	3	5	5	5	3,600
26	1	3	1	1	1	1	2	1	3	4	1,800
27	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1,200
28	3	4	4	1	1	5	1	1	3	1	2,400
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,000
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000
35	4	3	1	1	3	5	1	1	3	3	2,900
36	4	3	1	1	1	5	5	1	5	5	3,100
37	1	3	1	1	1	3	5	1	3	3	2,200
38	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4,700
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,000
43	5	4	1	1	5	1	5	5	3	5	3,500
44	1	2	1	1	5	1	3	1	2	4	2,100
45	3	2	1	1	5	1	3	1	1	1	1,900
46	1	2	3	1	5	1	5	1	4	5	2,800
47	1	5	3	1	5	1	5	1	1	1	2,400
48	4	3	3	1	5	5	5	1	5	5	3,700
49	3	4	1	1	5	1	1	1	4	1	2,200
TOTAL	116	130	102	90	127	118	155	100	168	153	
MEAN	2,367	2,653	2,082	1,837	2,592	2,408	3,163	2,041	3,429	3,122	

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner 'Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45' (Kelompok Penyusun Laporan Keuangan)

No.	Responden	Nomor Soal															Total Skor	Mean
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Skor																
1	UDD Pembina Provinsi Bali	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32	2,133
2	UDD Pembina Provinsi Bali	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	32	2,133
3	PMI Provinsi Bali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,000
4	PMI Kabupaten Gianyar	4	4	2	3	2	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	53	3,533
5	UDD PMI Kabupaten Gianyar	5	5	4	4	4	5	3	5	3	4	4	4	3	2	4	59	3,933
6	UDD PMI Kabupaten Gianyar	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	4,067
7	UDD PMI Kabupaten Bangli	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	5	4	55	3,667
8	UDD PMI Kabupaten Bangli	2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4	3	44	2,933
9	PMI Kabupaten Bangli	2	5	1	1	1	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	45	3,000
10	PMI Kabupaten Tabanan	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	48	3,200
11	UDD PMI Kabupaten Tabanan	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	37	2,467
12	UDD PMI Kabupaten Tabanan	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	58	3,867
13	UDD PMI Kota Denpasar	4	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	2,933
14	UDD PMI Kota Denpasar	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	54	3,600
15	UDD PMI Kabupaten Badung	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	2,333
16	UDD PMI Kabupaten Badung	2	2	2	2	2	2	5	3	4	4	5	4	4	4	4	49	3,267
17	PMI Kabupaten Klungkung	4	2	2	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55	3,667
18	UDD PMI Kabupaten Klungkung	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	3,333
19	UDD PMI Kabupaten Klungkung	2	1	3	1	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	46	3,067
20	PMI Kabupaten Karangasem	2	2	1	1	1	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	30	2,000
21	UDD PMI Kabupaten Karangasem	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	54	3,600
22	UDD PMI Kabupaten Karangasem	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	54	3,600
23	PMI Kabupaten Buleleng	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	66	4,400
24	UDD PMI Kabupaten Buleleng	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	55	3,667
25	UDD PMI Kabupaten Buleleng	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,000
26	PMI Kabupaten Jembrana	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	43	2,867
27	UDD PMI Kabupaten Jembrana	2	4	2	1	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	49	3,267
28	UDD PMI Kabupaten Jembrana	2	4	2	1	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	49	3,267
29	PMI Kota Denpasar	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55	3,667
30	PMI Kabupaten Badung	4	1	1	1	1	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	47	3,133
Mean		3,033	2,800	2,500	2,300	2,467	3,367	3,433	3,300	3,667	3,733	3,867	3,800	3,700	3,700	3,633		

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner 'Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45' (Kelompok Pengguna Laporan Keuangan)

No.	Responden	Nomor Soal															Total Skor	Mean
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Skor																
1	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	57	3,800
2	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	5	4	4	58	3,867
3	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	5	4	4	58	3,867
4	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	3,333
5	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	5	4	4	58	3,867
6	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59	3,933
7	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	5	4	2	2	2	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	55	3,667
8	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1	1	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	59	3,933
9	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	4	3	3	1	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	57	3,800
10	Dinas Sosial Provinsi Bali	5	1	1	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	63	4,200
11	Dinas Sosial Provinsi Bali	5	4	3	2	1	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3	61	4,067
12	Dinas Sosial Provinsi Bali	5	4	3	3	2	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	65	4,333
13	Dinas Sosial Provinsi Bali	4	2	3	1	3	4	3	4	4	5	5	4	5	4	5	56	3,733
14	Dinas Sosial Provinsi Bali	1	1	1	3	3	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	55	3,667
15	Dinas Sosial Provinsi Bali	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	47	3,133
16	Dinas Sosial Provinsi Bali	5	3	3	3	3	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	61	4,067
17	Dinas Sosial Provinsi Bali	4	2	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	50	3,333
18	Dinas Sosial Provinsi Bali	4	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53	3,533
19	Dinas Sosial Provinsi Bali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,000
20	Dinas Sosial Provinsi Bali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,000
21	Biro Kesra Setda Prov. Bali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	4,000
22	Biro Kesra Setda Prov. Bali	1	2	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	3,333
23	Biro Kesra Setda Prov. Bali	5	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	57	3,800
24	Biro Kesra Setda Prov. Bali	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	64	4,267
25	Biro Kesra Setda Prov. Bali	1	1	1	1	2	3	3	4	4	4	5	4	4	5	5	47	3,133
26	Biro Kesra Setda Prov. Bali	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	4	53	3,533
27	Biro Kesra Setda Prov. Bali	4	4	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	55	3,667
28	Biro Kesra Setda Prov. Bali	5	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	55	3,667
29	Biro Kesra Setda Prov. Bali	4	4	1	3	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	57	3,800
30	Biro Kesra Setda Prov. Bali	5	2	4	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	3	57	3,800
Mean		3,833	3,067	3,000	3,033	3,000	3,833	3,733	3,900	4,067	4,067	4,233	4,133	4,333	4,067	4,267		

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kuesioner Penelitian “Tingkat Kepatuhan Penerapan PSAK 45”

PATUH1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	1	10.0	10.0	10.0
Sering	3	30.0	30.0	40.0
Selalu	6	60.0	60.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	70.0
Kadang-kadang	2	20.0	20.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	4	40.0	40.0	40.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	50.0
Sering	2	20.0	20.0	70.0
Selalu	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	70.0
Kadang-kadang	2	20.0	20.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	5	50.0	50.0	50.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	60.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	70.0
Sering	2	20.0	20.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	8	80.0	80.0	80.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	9	90.0	90.0	90.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
Kadang-kadang	2	20.0	20.0	80.0
Selalu	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-kadang	4	40.0	40.0	40.0
Sering	3	30.0	30.0	70.0
Selalu	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	20.0	20.0	20.0
	Kadang-kadang	2	20.0	20.0	40.0
	Sering	3	30.0	30.0	70.0
	Selalu	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	1	10.0	10.0	10.0
	Kadang-kadang	2	20.0	20.0	30.0
	Sering	3	30.0	30.0	60.0
	Selalu	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sering	3	30.0	30.0	30.0
	Selalu	7	70.0	70.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	20.0	20.0	20.0
	Kadang-kadang	2	20.0	20.0	40.0
	Sering	2	20.0	20.0	60.0
	Selalu	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	7	70.0	70.0	70.0
	Kadang-kadang	2	20.0	20.0	90.0
	Selalu	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	8	80.0	80.0	80.0
	Kadang-kadang	1	10.0	10.0	90.0
	Selalu	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
	Kadang-kadang	3	30.0	30.0	90.0
	Selalu	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	3	30.0	30.0	30.0
	Kadang-kadang	3	30.0	30.0	60.0
	Sering	2	20.0	20.0	80.0
	Selalu	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	4	40.0	40.0	40.0
	Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	50.0
	Kadang-kadang	1	10.0	10.0	60.0
	Sering	2	20.0	20.0	80.0
	Selalu	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	20.0	20.0	20.0
	Kadang-kadang	6	60.0	60.0	80.0
	Sering	1	10.0	10.0	90.0
	Selalu	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	10.0
	Kadang-kadang	3	30.0	30.0	40.0
	Sering	2	20.0	20.0	60.0
	Selalu	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
	Kadang-kadang	1	10.0	10.0	70.0
	Sering	1	10.0	10.0	80.0
	Selalu	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH22

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	1	10.0	10.0	10.0
	Kadang-kadang	4	40.0	40.0	50.0
	Sering	1	10.0	10.0	60.0
	Selalu	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	3	30.0	30.0	30.0
	Kadang-kadang	3	30.0	30.0	60.0
	Sering	1	10.0	10.0	70.0
	Selalu	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	7	70.0	70.0	70.0
	Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	80.0
	Kadang-kadang	1	10.0	10.0	90.0
	Sering	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH25

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	2	20.0	20.0	20.0
	Kadang-kadang	2	20.0	20.0	40.0
	Sering	2	20.0	20.0	60.0
	Selalu	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
	Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	70.0
	Kadang-kadang	2	20.0	20.0	90.0
	Sering	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

PATUH27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	9	90.0	90.0	90.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	5	50.0	50.0	50.0
Kadang-kadang	2	20.0	20.0	70.0
Sering	2	20.0	20.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH29

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-kadang	10	100.0	100.0	100.0

PATUH30

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-kadang	10	100.0	100.0	100.0

PATUH31

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	10	100.0	100.0	100.0

PATUH32

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sering	10	100.0	100.0	100.0

PATUH33

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-kadang	10	100.0	100.0	100.0

PATUH34

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	10	100.0	100.0	100.0

PATUH35

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	3	30.0	30.0	30.0
Kadang-kadang	4	40.0	40.0	70.0
Sering	1	10.0	10.0	80.0
Selalu	2	20.0	20.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH36

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	4	40.0	40.0	40.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	50.0
Sering	1	10.0	10.0	60.0
Selalu	4	40.0	40.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH37

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	5	50.0	50.0	50.0
Kadang-kadang	4	40.0	40.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH38

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kadang-kadang	1	10.0	10.0	10.0
Sering	1	10.0	10.0	20.0
Selalu	8	80.0	80.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH39

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	10	100.0	100.0	100.0

PATUH40

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	10	100.0	100.0	100.0

PATUH41

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	10	100.0	100.0	100.0

PATUH42

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	10	100.0	100.0	100.0

PATUH43

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	3	30.0	30.0	30.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	40.0
Sering	1	10.0	10.0	50.0
Selalu	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH44

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	5	50.0	50.0	50.0
Hampir tidak pernah	2	20.0	20.0	70.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	80.0
Sering	1	10.0	10.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH45

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	70.0
Kadang-kadang	2	20.0	20.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH46

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	4	40.0	40.0	40.0
Hampir tidak pernah	1	10.0	10.0	50.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	60.0
Sering	1	10.0	10.0	70.0
Selalu	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH47

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	70.0
Selalu	3	30.0	30.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH48

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	2	20.0	20.0	20.0
Kadang-kadang	2	20.0	20.0	40.0
Sering	1	10.0	10.0	50.0
Selalu	5	50.0	50.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

PATUH49

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	6	60.0	60.0	60.0
Kadang-kadang	1	10.0	10.0	70.0
Sering	2	20.0	20.0	90.0
Selalu	1	10.0	10.0	100.0
Total	10	100.0	100.0	

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kuesioner Penelitian “Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45”

TAHU1 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
TAHU1	1	Count	3	4	7
		% within Kelompok	10.0%	13.3%	11.7%
	2	Count	10	1	11
		% within Kelompok	33.3%	3.3%	18.3%
	3	Count	2	0	2
		% within Kelompok	6.7%	.0%	3.3%
	4	Count	13	16	29
		% within Kelompok	43.3%	53.3%	48.3%
	5	Count	2	9	11
		% within Kelompok	6.7%	30.0%	18.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

TAHU2 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
TAHU2	1	Count	6	4	10
		% within Kelompok	20.0%	13.3%	16.7%
	2	Count	7	6	13
		% within Kelompok	23.3%	20.0%	21.7%
	3	Count	6	4	10
		% within Kelompok	20.0%	13.3%	16.7%
	4	Count	9	16	25
		% within Kelompok	30.0%	53.3%	41.7%
	5	Count	2	0	2
		% within Kelompok	6.7%	.0%	3.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

TAHU3 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
TAHU3	1	Count	7	4	11
		% within Kelompok	23.3%	13.3%	18.3%
	2	Count	9	5	14
		% within Kelompok	30.0%	16.7%	23.3%
	3	Count	7	8	15
		% within Kelompok	23.3%	26.7%	25.0%
	4	Count	6	13	19
		% within Kelompok	20.0%	43.3%	31.7%
	5	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

TAHU4 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
TAHU4	1	Count	10	4	14
		% within Kelompok	33.3%	13.3%	23.3%
	2	Count	7	7	14
		% within Kelompok	23.3%	23.3%	23.3%
	3	Count	7	5	12
		% within Kelompok	23.3%	16.7%	20.0%
	4	Count	6	12	18
		% within Kelompok	20.0%	40.0%	30.0%
	5	Count	0	2	2
		% within Kelompok	.0%	6.7%	3.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

TAHU5 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
TAHU5	1	Count	8	1	9
		% within Kelompok	26.7%	3.3%	15.0%
	2	Count	7	10	17
		% within Kelompok	23.3%	33.3%	28.3%
	3	Count	8	8	16
		% within Kelompok	26.7%	26.7%	26.7%
	4	Count	7	10	17
		% within Kelompok	23.3%	33.3%	28.3%
	5	Count	0	1	1
		% within Kelompok	.0%	3.3%	1.7%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

LEGAL1 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
LEGAL1	1	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	2	Count	5	0	5
		% within Kelompok	16.7%	.0%	8.3%
	3	Count	8	8	16
		% within Kelompok	26.7%	26.7%	26.7%
	4	Count	14	19	33
		% within Kelompok	46.7%	63.3%	55.0%
	5	Count	2	3	5
		% within Kelompok	6.7%	10.0%	8.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

LEGAL2 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
LEGAL2	1	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	2	Count	4	4	8
		% within Kelompok	13.3%	13.3%	13.3%
	3	Count	7	6	13
		% within Kelompok	23.3%	20.0%	21.7%
	4	Count	17	14	31
		% within Kelompok	56.7%	46.7%	51.7%
	5	Count	1	6	7
		% within Kelompok	3.3%	20.0%	11.7%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

LEGAL3 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
LEGAL3	1	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	2	Count	4	1	5
		% within Kelompok	13.3%	3.3%	8.3%
	3	Count	12	4	16
		% within Kelompok	40.0%	13.3%	26.7%
	4	Count	11	22	33
		% within Kelompok	36.7%	73.3%	55.0%
	5	Count	2	3	5
		% within Kelompok	6.7%	10.0%	8.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

PENERAP1 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP1	2	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	3	Count	9	1	10
		% within Kelompok	30.0%	3.3%	16.7%
	4	Count	19	26	45
		% within Kelompok	63.3%	86.7%	75.0%
	5	Count	1	3	4
		% within Kelompok	3.3%	10.0%	6.7%
	Total	Count	30	30	60
		% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%

PENERAP2 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP2	3	Count	9	2	11
		% within Kelompok	30.0%	6.7%	18.3%
	4	Count	20	24	44
		% within Kelompok	66.7%	80.0%	73.3%
	5	Count	1	4	5
		% within Kelompok	3.3%	13.3%	8.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

PENERAP3 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP3	2	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	3	Count	4	1	5
		% within Kelompok	13.3%	3.3%	8.3%
	4	Count	23	21	44
		% within Kelompok	76.7%	70.0%	73.3%
5	Count	2	8	10	
	% within Kelompok	6.7%	26.7%	16.7%	
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

PENERAP4 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP4	2	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	3	Count	5	1	6
		% within Kelompok	16.7%	3.3%	10.0%
	4	Count	23	24	47
		% within Kelompok	76.7%	80.0%	78.3%
5	Count	1	5	6	
	% within Kelompok	3.3%	16.7%	10.0%	
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

PENERAP5 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP5	2	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	3	Count	8	1	9
		% within Kelompok	26.7%	3.3%	15.0%
	4	Count	20	18	38
		% within Kelompok	66.7%	60.0%	63.3%
	5	Count	1	11	12
		% within Kelompok	3.3%	36.7%	20.0%
	Total	Count	30	30	60
		% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%

PENERAP6 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP6	1	Count	0	1	1
		% within Kelompok	.0%	3.3%	1.7%
	2	Count	2	0	2
		% within Kelompok	6.7%	.0%	3.3%
	3	Count	7	1	8
		% within Kelompok	23.3%	3.3%	13.3%
	4	Count	19	22	41
		% within Kelompok	63.3%	73.3%	68.3%
	5	Count	2	6	8
		% within Kelompok	6.7%	20.0%	13.3%
Total	Count	30	30	60	
	% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%	

PENERAP7 * Kelompok Crosstabulation

			Kelompok		Total
			Penyusun	Pengguna	
PENERAP7	2	Count	1	0	1
		% within Kelompok	3.3%	.0%	1.7%
	3	Count	9	2	11
		% within Kelompok	30.0%	6.7%	18.3%
	4	Count	20	18	38
		% within Kelompok	66.7%	60.0%	63.3%
	5	Count	0	10	10
		% within Kelompok	.0%	33.3%	16.7%
	Total	Count	30	30	60
		% within Kelompok	100.0%	100.0%	100.0%

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Tahap II)
Variabel ‘Kepatuhan Penerapan PSAK 45’ Indikator ‘Prinsip Pengakuan’

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PATUH2	46.8000	263.5111	.6034	.9047
PATUH3	45.7000	254.0111	.5995	.9051
PATUH4	46.8000	264.8444	.5720	.9054
PATUH6	47.2000	273.7333	.4021	.9093
PATUH7	47.6000	284.9333	.6744	.9094
PATUH8	46.5000	242.2778	.8973	.8957
PATUH10	45.2000	258.1778	.6552	.9032
PATUH14	46.9000	262.1000	.6223	.9042
PATUH15	47.1000	258.1000	.7450	.9013
PATUH16	46.7000	264.2333	.5655	.9056
PATUH17	45.7000	270.9000	.3670	.9110
PATUH18	46.0000	262.2222	.4916	.9080
PATUH19	45.8000	262.8444	.7201	.9025
PATUH20	44.8000	275.9556	.4121	.9089
PATUH21	46.4000	256.2667	.5806	.9055
PATUH22	45.0000	279.5556	.2435	.9130
PATUH23	45.6000	256.7111	.6145	.9043
PATUH25	45.1000	268.1000	.4190	.9097
PATUH26	46.9000	263.4333	.7465	.9023
PATUH27	47.5000	277.8333	.6640	.9068

Reliability Coefficients

N of Cases = 10.0

N of Items = 20

Alpha = .9102

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Tahap III)
Variabel ‘Kepatuhan Penerapan PSAK 45’ Indikator ‘Prinsip Pengakuan’

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PATUH2	43.1000	251.6556	.5985	.9079
PATUH3	42.0000	242.2222	.5983	.9084
PATUH4	43.1000	252.9889	.5664	.9087
PATUH6	43.5000	260.7222	.4202	.9120
PATUH7	43.9000	272.5444	.6619	.9125
PATUH8	42.8000	231.2889	.8854	.8990
PATUH10	41.5000	244.7222	.6894	.9053
PATUH14	43.2000	249.9556	.6252	.9072
PATUH15	43.4000	246.2667	.7427	.9043
PATUH16	43.0000	252.6667	.5536	.9090
PATUH17	42.0000	260.2222	.3348	.9151
PATUH18	42.3000	248.6778	.5209	.9104
PATUH19	42.1000	249.8778	.7462	.9049
PATUH20	41.1000	264.3222	.3919	.9124
PATUH21	42.7000	246.0111	.5488	.9098
PATUH23	41.9000	242.9889	.6518	.9064
PATUH25	41.4000	255.6000	.4256	.9127
PATUH26	43.2000	251.7333	.7365	.9054
PATUH27	43.8000	265.7333	.6509	.9100

Reliability Coefficients

N of Cases = 10.0

N of Items = 19

Alpha = .9130

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas
Variabel 'Kepatuhan Penerapan PSAK 45' Indikator 'Prinsip Pengukuran'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

* * * Warning * * * Zero variance items

* * * Scale or part of scale has zero variance and will be bypassed

Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	N of Variables
SCALE	4.0000	.0000	.0000	2

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas
Variabel 'Kepatuhan Penerapan PSAK 45' Indikator 'Prinsip Pengungkapan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PATUH35	10.0000	11.7778	.7861	.7274
PATUH36	9.8000	9.0667	.8338	.7169
PATUH37	10.7000	12.4556	.8015	.7252
PATUH38	8.2000	19.7333	.3558	.8970

Reliability Coefficients

N of Cases = 10.0

N of Items = 4

Alpha = .8323

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Tahap I) Variabel 'Kepatuhan Penerapan PSAK 45' Indikator 'Prinsip Penyajian'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PATUH39	21.6000	71.8222	.0000	.8086
PATUH40	21.6000	71.8222	.0000	.8086
PATUH41	21.6000	71.8222	.0000	.8086
PATUH42	21.6000	71.8222	.0000	.8086
PATUH43	19.1000	54.5444	.5108	.7818
PATUH44	20.5000	52.2778	.8325	.7401
PATUH45	20.7000	54.9000	.7409	.7533
PATUH46	19.8000	50.8444	.6839	.7556
PATUH47	20.2000	52.8444	.5575	.7756
PATUH48	18.9000	56.3222	.5220	.7782
PATUH49	20.4000	56.9333	.5020	.7806

Reliability Coefficients

N of Cases = 10.0

N of Items = 11

Alpha = .8005

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (Tahap II) Variabel 'Kepatuhan Penerapan PSAK 45' Indikator 'Prinsip Penyajian'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PATUH43	15.1000	54.5444	.5108	.8443
PATUH44	16.5000	52.2778	.8325	.7993
PATUH45	16.7000	54.9000	.7409	.8136
PATUH46	15.8000	50.8444	.6839	.8161
PATUH47	16.2000	52.8444	.5575	.8377
PATUH48	14.9000	56.3222	.5220	.8404
PATUH49	16.4000	56.9333	.5020	.8431

Reliability Coefficients

N of Cases = 10.0

N of Items = 7

Alpha = .8490

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Indikator 'Pengetahuan Tentang PSAK 45' Variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' Kelompok 'Penyusun Laporan Keuangan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
TAHU1	10.0667	17.9264	.7289	.9177
TAHU2	10.3000	18.2862	.6462	.9355
TAHU3	10.6000	17.2138	.8617	.8912
TAHU4	10.8000	16.9241	.9175	.8804
TAHU5	10.6333	17.4816	.8572	.8926

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0 N of Items = 5
Alpha = .9217

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Indikator 'Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45' Variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' Kelompok 'Penyusun Laporan Keuangan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
LEGAL1	6.7333	2.7540	.4511	.8063
LEGAL2	6.6667	2.7126	.5442	.6966
LEGAL3	6.8000	2.2345	.7510	.4465

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0 N of Items = 3
Alpha = .7471

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Indikator 'Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI' Variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' Kelompok 'Penyusun Laporan Keuangan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PENERAP1	22.4333	8.5989	.7239	.9127
PENERAP2	22.3667	8.9989	.7269	.9126
PENERAP3	22.2333	8.3920	.8528	.8997
PENERAP4	22.3000	8.5621	.8300	.9025
PENERAP5	22.4000	8.4552	.7880	.9060
PENERAP6	22.4000	8.1793	.7143	.9164
PENERAP7	22.4667	8.9471	.6869	.9160

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0 N of Items = 7
Alpha = .9214

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Indikator 'Pengetahuan Tentang PSAK 45' Variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' Kelompok 'Pengguna Laporan Keuangan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
TAHU1	12.1000	11.3345	.3537	.7539
TAHU2	12.8667	9.7747	.6975	.6130
TAHU3	12.9333	10.0644	.7027	.6161
TAHU4	12.9000	10.8517	.4652	.7061
TAHU5	12.9333	12.7540	.3341	.7457

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0 N of Items = 5
Alpha = .7375

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Indikator 'Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45' Variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' Kelompok 'Pengguna Laporan Keuangan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
LEGAL1	7.6333	1.5506	.6158	.3736
LEGAL2	7.7333	1.0299	.4629	.6027
LEGAL3	7.5667	1.8402	.3641	.6496

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0 N of Items = 3
Alpha = .6395

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Indikator 'Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI' Variabel 'Persepsi Penerapan PSAK 45' Kelompok 'Pengguna Laporan Keuangan'

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis *****

-

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PENERAP1	25.1000	5.8862	.5371	.8267
PENERAP2	25.1000	5.4724	.6161	.8136
PENERAP3	24.9333	5.0989	.7110	.7975
PENERAP4	25.0333	5.5506	.6023	.8161
PENERAP5	24.8333	4.9713	.6978	.7980
PENERAP6	25.1000	4.9207	.4581	.8544
PENERAP7	24.9000	4.9207	.6609	.8039

Reliability Coefficients

N of Cases = 30.0 N of Items = 7
Alpha = .8379

NPar Tests

(Kelompok Penyusun Laporan Keuangan)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengetahuan Tentang PSAK 45	Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI	Pendapat Terkait Legalitas PSAK 45
N		30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.6200	3.7286	3.3667
	Std. Deviation	1.03770	.48532	.75481
Most Extreme Differences	Absolute	.157	.255	.199
	Positive	.157	.155	.101
	Negative	-.108	-.255	-.199
Kolmogorov-Smirnov Z		.861	1.396	1.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.449	.041	.184

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

NPar Tests

(Kelompok Pengguna Laporan Keuangan)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengetahuan Tentang PSAK 45	Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI	Pendapat Terkait Legalitas PSAK 45
N		30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.1867	4.1667	3.8222
	Std. Deviation	.80161	.37719	.55869
Most Extreme Differences	Absolute	.178	.229	.225
	Positive	.155	.204	.142
	Negative	-.178	-.229	-.225
Kolmogorov-Smirnov Z		.976	1.256	1.231
Asymp. Sig. (2-tailed)		.297	.085	.096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

T-Test Indikator 'Pengetahuan Tentang PSAK 45'

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pengetahuan Tentang PSAK 45	Penyusun	30	2.6200	1.03770	.18946
	Pengguna	30	3.1867	.80161	.14635

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pengetahuan Tentang PSAK 45	Equal variances assumed	3.017	.088	-2.367	58	.021	-.5667	.23940	-1.04588	-.08745
	Equal variances not assumed			-2.367	54.522	.022	-.5667	.23940	-1.04653	-.08680

NPar Tests

Mann-Whitney Test Indikator 'Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI'

Ranks

	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI	Penyusun	30	21.87	656.00
	Pengguna	30	39.13	1174.00
	Total	60		

Test Statistics^a

	Pendapat Mengenai Penerapan PSAK 45 di PMI
Mann-Whitney U	191.000
Wilcoxon W	656.000
Z	-3.933
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Grouping Variable: Kelompok

T-Test Indikator 'Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45'

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45	Penyusun	30	3.3667	.75481	.13781
	Pengguna	30	3.8222	.55869	.10200

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Pandangan Terkait Legalitas PSAK 45	Equal variances assumed	4.335	.042	-2.657	58	.010	-.4556	.17145	-.79875	-.11236
	Equal variances not assumed			-2.657	53.440	.010	-.4556	.17145	-.79938	-.11173

T-Test Variabel 'Persepsi Terhadap Penerapan PSAK 45'

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Persepsi penerapan	Penyusun	30	3.2867	.61704	.11266
	Pengguna	30	3.7711	.32315	.05900

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Persepsi penerapan	Equal variances assumed	9.315	.003	-3.809	58	.000	-.4844	.12717	-.73900	-.22989
	Equal variances not assumed			-3.809	43.795	.000	-.4844	.12717	-.74077	-.22812